

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

Putri Rahayu

NIM 401190297

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Rahayu, Putri. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. 2023. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Hanik Fitriani, M.E.Sy.

Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan Pangan Non Tunai, Pengentasan Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara ekonomi. Salah satu program untuk pengentasan kemiskinan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Yang merupakan program dari Dinas Sosial di Kabupaten Ponorogo. Secara teori, tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya di artikan sebagai hasil yang tepat guna. Jadi antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju untuk mencapai ketepatan sasaran harus sesuai dengan kriteria penerima yaitu kelompok keluarga penerima manfaat yang berhak mendapatkan. Sedangkan terdapat permasalahan yang terjadi di lapangan masih banyak penerima Bantuan Pangan Non Tunai yang belum tepat.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis realisasi program BPNT dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Ponorogo, untuk menganalisis kendala yang ditemui program BPNT di wilayah Kabupaten Ponorogo dalam pengentasan kemiskinan, serta untuk menganalisis efektivitas program BPNT dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data adalah dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah: 1) Realisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kabupaten Ponorogo yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan kebutuhan pangan. Program BPNT disalurkan melalui pendamping kecamatan untuk bertanggung jawab. Penyaluran BPNT melibatkan Agen Warung untuk pengambilan bahan pangan seperti sayuran, telur dan lain sebagainya. 2) Kendala program BPNT dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Ponorogo seperti data diri yang tidak sesuai mengakibatkan pada Kartu Keluarga Sejahtera tidak keluar. 3) Efektivitas program BPNT dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Ponorogo meliputi: Ketepatan sasaran belum efektif karena masih banyak di temukan masyarakat miskin yang belum merasakan manfaat dari program yang di salurkan, Sosialisasi program belum efektif karena masih banyak masyarakat belum paham akan manfaat bantuan tersebut, Tujuan program telah efektif hal ini dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui program bantuan tersebut, Pemantau program belum efektif sebab pemantauan dari pihak pendamping masih kurang efektif.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Putri Rahayu	401190297	Ekonomi Syariah	Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 28 Maret 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I
NIP. 197801122006041002

Menyetujui,

Hanik Fitriani, M.E.Sy
NIP. 199104242020122028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam
Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo
Nama : Putri Rahayu
Nim : 401190297
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah disajikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang
Iza Hanifuddin, Ph.D
NIP. 196906241998031002

:

()

Penguji I
Dr.Hj. Ely Masykuroh, M.Si
NIP. 197202111999032003

:

()

Penguji II
Hanik Fitriani, M.E.Sy
NIP. 199104242020122028

:

()

Ponorogo, 17 April 2023
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Lutfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 19720714200031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Rahayu
NIM : 401190297
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 Mei 2023



Putri Rahayu
401190297

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Rahayu

NIM : 401190297

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PONOROGO

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 28 Maret 2023

Pembuat Pernyataan

Putri Rahayu

NIM 401190297

DAFTAR ISI

COVER

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Studi Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II KAJIAN TEORI	31
A. Teori Efektivitas	31
1. Pengertian Efektivitas	31
2. Indikator Efektivitas BPNT.....	33

3. Ukuran Efektivitas	36
B. Kendala	37
C. Teori Kemiskinan.....	38
1. Pengertian Kemiskinan	38
2. Bentuk Kemiskinan.....	39
3. Pengentasan Kemiskinan	40
BAB III PAPARAN DATA	42
A. Gambaran Umum	42
1. Geografi Wilayah Penelitian	42
2. Demografi Kabupaten Ponorogo.....	43
3. Kondisi Masyarakat Kabupaten Ponorogo.....	44
4. Program BPNT di Kabupaten Ponorogo	45
B. Data.....	52
1. Realisasi Program BPNT Dalam Pengentasan Kemiskinan	52
2. Kendala yang ditemui Program BPNT Dalm Pengentasan Kemiskinan	54
3. Efektivitas Program BPNT Dalam Pengentasan Kemiskinan .	57
BAB IV ANALISIS DATA.....	67
A. Realisasi Program BPNT Dalam Pengentasan Kemiskinan	71
B. Efektivitas Program BPNT Dalam Pengentasan Kemiskinn	73
C. Kendala Program BPNT Dalam Pengentasan Kemiskinan	82
BAB V PENUTUP	79

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Penduduk Miskin.....	5
Tabel 1.2 Komposisi Penduduk berdasarkan Kelamin	43
Tabel 2.2 Komposisi Tingkat Pendidikan	43
Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana	44
Tabel 4.2 Data KPM BPNT Kabupaten Ponorogo Tahun 2022	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi yang dialami oleh negara-negara berkembang, bahkan negara-negara maju. Kemiskinan yang sedang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh berbagai faktor hal yang saling berkaitan erat satu sama lain. pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan akan berusaha, menjadi beban keluarga, dan kurang tersedianya lapangan kerja, adalah faktor-faktor yang berkontribusi pada kemiskinan. Berdasarkan faktor tersebut dapat dikatakan bahwa suatu permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia erat dalam kaitannya dengan menjadi pengangguran.¹ Dalam kondisi ini sebuah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu secara ekonomi, sosial, dan partisipasi masyarakat. Terlepas dari fakta bahwa definisi kemiskinan, dapat dikatakan dengan pasti bahwa kemiskinan tetap berada dalam keadaan serba kekurangan.

Dalam dimensi ekonomi, kemiskinan sangat mudah dilihat dan menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, perumahan dan kesehatan. Kemiskinan secara ekonomi kualitatif dapat dilihat dari kondisi perumahan yang kumuh dengan perabotan dengan seadanya, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan kesehatan yang rendah. Sedangkan

¹ Baihaqi, "Analisis Efektivitas Peran Pemerintah Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan (Kajian Di Kabupaten Pidie Jaya)," *Journal of Islamic Law* 04, no. 01 (2022): 2.

dilihat secara kuantitatif keadaan hidup manusia serba kekurangan, atau dengan bahasa yang tidak lazim “tidak berharta benda”. Pada dimensi sosial budaya kemiskinan memang tidak dapat dihitung dengan angka-angka, tetapi muncul dari bentuk budaya kemiskinan. Misalnya adanya respon tertentu yang telah dilakukan oleh masyarakat miskin dalam menyikapi hidup, seperti boros dalam membelanjakan uang, mudah putus asa, merasa tidak berdaya dan apatis.²

Kebijakan kemiskinan merupakan suatu usaha dalam pengambilan keputusan hal kemiskinan mulai dari menentukan target dengan menggunakan indikator, penanganan dan penanggulangan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dalam peraturan presiden No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan menyebutkan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.³

Menurut Robert Chamber sebagai inti dari masalah kemiskinan. Menurutnya perangkat kemiskinan itu terdiri dari lima unsur yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, kadar sosial, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Pada kelima unsur ini sering kali saling berkait satu dengan yang lain sehingga

² Masyuri Imron, “Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan,” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 5, no. 1 (2003): 70.

³ Khodziah Isnaini Kholif and Irwan Noor, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, JAP*, 710.

berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin.⁴ Pada kelima unsur ini sering kali saling berkait satu dengan yang lain sehingga berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin.

Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi dan program. Efektivitas memiliki tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Ketika suatu program berjalan dengan baik, maka suatu organisasi tersebut telah menjalankan organisasi yang efektif.⁵ Sedangkan efektivitas program merupakan tingkat perwujudan sasaran yang mewujudkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan.⁶ Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil senantiasa yang berkaitan dengan efisien.

Menurut Soewarno dikemukakan bahwa teori efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas di artikan sebagai hasil yang tepat guna.⁷ Maka dari itu untuk meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia pada rapat Kabinet Terbatas memberikan panduan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai. Hal ini sesuai peraturan Indonesia No. 82 Tahun

⁴ Ananda Mahardika Mujahiddin, *Perempuan Dan Kemiskinan* (Medan: UMSU-PRESS, 2017), 14.

⁵ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 92.

⁶ Julia Sopha, *Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 26.

⁷ Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: Haji Masagung, 2016), 162.

2016 yang menyatakan bahwa strategi pengelolaan keuangan dan keterhubungan masyarakat dengan perbankan merupakan upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.⁸

Dalam peranan Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo menjalankan pembangunan daerah yang telah diamanatkan oleh pemerintah daerah pusat berupa peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di tingkatan di dalam kota saja tetapi di perhatikan lagi untuk keseluruhan wilayah kota Ponorogo sampai ke desa. Upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, maka melakukan berbagai program-program pemerintah. Program pemerintah untuk kemampuan melakukan sesuatu dan pengentasan masyarakat miskin yang telah dilakukan sejak akhir tahun 60-an.⁹

Banyaknya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan menjadikan pemerintah berupaya keras dalam program pemberantasan kemiskinan yang melalui penyaluran bantuan dana dari pemerintah pusat dan daerah. Namun, program ini tidak berjalan semestinya dan tidak tepat sasaran. Hal ini menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, pemulihan ekonomi sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan laju ekonomi. Namun, perlu digarisbawahi bahwa ketika angka kemiskinan menurun tidak berarti bahwa kondisi ekonomi selalu meningkat. Tujuan dari

⁸ Wahyudi Rachman Benny, Adang Agustina, "Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)," *Analisis Kebijakan Pertanian* 16, no. 1 (2018): 2.

⁹ Monika Yuliana, "Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

pemulihan ekonomi nasional adalah untuk mengoptimalkan angka kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dapat diukur melalui tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan penyebaran pendapat.¹⁰

Tabel 1.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)
2017	869.894	99,22
2018	870.705	90,22
2019	871.370	83,97
2020	949.318	86,74
2021	950.489	89,94

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2021¹¹

Dari table di atas dapat diketahui jika mengamati dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa rangkaian jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo setiap tahun mengalami penambahan. Di tahun 2018, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 9 persen. Penurunan jumlah penduduk tersebut dikarenakan turunnya harga barang kebutuhan pokok. Kemudian di tahun 2018 sampai tahun 2021 jumlah kemiskinan mengalami kenaikan kembali karena inflasi barang yaitu pakaian, makanan, tempat tinggal dan inflasi bahan bakar minyak.

Perkembangan jumlah penduduk miskin di kabupaten Ponorogo setiap tahunnya tidak stabil terkadang mengalami peningkatan bahkan juga mengalami penurunan seperti berita dari BPS Ponorogo yang menyatakan

¹⁰ Arsyad Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, Unit Pener (Yogyakarta, 2020), 23.

¹¹ Badan Pusat Kabupaten Ponorogo Statistik, "Garis Kemiskinan, Jumlah, Dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Ponorogo 2019-2021," BPS PONOROGO, 2021, <https://ponorogokab.bps.go.id>.

bahwa pada garis kemiskinan di Ponorogo mengalami penurunan sebesar 9,05 persen. Namun dengan masih adanya RTS (Rumah Tangga Sasaran) maka dapat ditentukan program-program pemerintah untuk penduduk miskin. RTS didapat dari hasil sensus BPS sedangkan jumlah penduduk miskin didapat dari survey sosial ekonomi nasional untuk evaluasi program pemerintah di bidang pengentasan kemiskinan. Dari data RTS yang diperoleh akan digunakan untuk program bantuan sosial, diantaranya yaitu adanya bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sehat (KKS), Sembako (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam hal ini program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui prosedur akun elektronik yang dimanfaatkan hanya untuk membelanjakan keperluan sandang pangan di pedagang pangan/ *e-warong* yang bekerjasama dengan bank. Sebagai syarat memperoleh BPNT para keluarga penerima manfaat perlu memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Adapun tujuan program bantuan tersebut meningkatkan ketetapan kelompok sasaran memberikan gizi yang lebih seimbang kepada penerima manfaat. Kriteria penerima Bantuan Pangan Non Tunai yaitu kepala rumah tangga memiliki pendapatan 600 ribu per bulannya, dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, dan lain sebagainya.¹² Menurut kepala Dinas

¹² Sri Sulastri Ishak, Fadlurrohman, Soni Akhmad Nulhaqim, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi)," *Social Work Journal* 9, no. 2 (2019): 124.

Sosial jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Ponorogo berjumlah 97.622 jiwa, dan sekitar 42.003 jiwa penerima BPNT.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa hampir 50% dari KPM (keluarga penerima manfaat) program bantuan dari Dinas Sosial menerima Bantuan Pangan Non Tunai sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai keluarga miskin diberikan akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar gii, perawatan, dan pendampingan termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya.

Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat Kabupaten Ponorogo merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat kurang mampu. Dengan disalurkan bantuan ini dari pemerintah ke masyarakat, diharapkan masyarakat mampu mempertahankan keadaan ekonomi keluarga dan dapat dimanfaatkan secara efektif. Selain itu, dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tepat sasaran dalam penyalurannya

Berdasarkan hasil wawancara pendamping kecamatan mengatakan “Selaku pendamping hanya bertugas sebagai mendampingi tidak berhak menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Sebab perangkat desa yang mendata warganya siapa yang layak sesuai kriteria. Kriterianya itu harus berada basis data terpadu yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25%

¹³ Kominfo, “52 Keluarga Miskin Lulus Dari Status KPM PKH,” Kominfo Ponorogo, 2020, <https://ponorogo.go.id/2019/05/16/52-keluarga-miskin-lulus-dari-status-kpm-pkh/>.

atau biasa disebut kurang mampu.”¹⁴ Selanjutnya dengan keluarga penerima BPNT mengatakan “Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di wilayah Ponorogo masih belum tepat sasaran sehingga masih adanya kecemburuan sosial. Terdapat keluarga yang seharusnya dapat merasakan manfaat dari adanya program tersebut tetapi tidak mendapatkannya.”¹⁵

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupateen Ponorogo, banyak mendapatkan respon yang positif dan negatif dari masyarakat. Adapun respon positif dari masyarakat yaitu mereka sangat terbantu dengan adanya program bantuan ini, dengan adanya program bantuan ini beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka sedikit berkurang. Sedangkan tanggapan negatif yang diberikan masyarakat terutama yang tidak mendapatkan bantuan BPNT, berdasarkan hasil wawancara di atas dengan ibu Sumiyem mengatakan bahwa program ini tidak adil karena dalam realitanya penyaluran bantuan sosial Pangan Non Tunai ditemukan adanya kesenjangan sosial. Dimana dalam penyalurannya dirasa kurang tepat sasaran, hal ini dikarenakan masyarakat yang sudah dikategorikan masyarakat mampu masih menerima bantuan, sedangkan masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan berhak mendapatkan bantuan justru tidak menerima bantuan sama sekali. Sehingga membuat kecemburuan sosial antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Sebaiknya program bantuan tersebut harus disalurkan dengan tepat sasaran agar tidak menimbulkan kesenjangan masyarakat.

¹⁴ Bapak Edi, *Wawancara*, Ponorogo, 4 Februari 2023.

¹⁵ Ibu Sumiyem, *Wawancara*, Ponorogo, 4 Februari 2023.

Selain itu permasalahan lain selain ketidaktepatan sasaran yang muncul akibat bantuan ini yakni mengenai tujuan pemanfaatan dan pengelolaan dan bantuan yang diberikan, bahwa dana bantuan tersebut tidak dipergunakan sebaik mungkin dan tidak selaras dengan tujuan pemberian Bantuan Pangan Non Tunai. Seharusnya dana bantuan yang diberikan harus dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan bukan untuk berfoya-foya.

Setelah pengamatan di lapangan, peneliti tertarik untuk mengamati lebih dalam lagi tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengingat angka kemiskinan yang cukup tinggi dengan program bantuan tersebut dapat meringankan dampak kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Ponorogo. Namun permasalahan yang terjadi di lapangan masih banyak penerima bantuan pangan non tunai yang belum tepat (tepat sasaran penerima manfaat, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas). Sehingga berdasarkan data angka kemiskinan tentu menjadi salah satu perhatian karena dapat menimbulkan ketidakefektifan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini.¹⁶ Maka diperlukan teori efektivitas untuk mengukur tercapainya tujuan yang tepat.¹⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti merasa tertarik dan penting untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana efektivitas program bantuan pemerintah tersampaikan kepada masyarakat miskin dengan secara baik dan digunakan sebaik mungkin dengan judul, “Efektivitas Program

¹⁶ Ni Wayan Budiani, “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna ‘Eka Bhakti’ Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar,” *Ekonomi Dan Sosial INPUT* 2, no. 1 (2017): 34.

¹⁷ Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*.

Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Realisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo?
2. Kendala-kendala apa yang ditemui Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka penulis mempunyai tujuan yang ingin di capai yaitu:

1. Untuk menganalisis Realisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menganalisis Kendala-kendala yang ditemui Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk menganalisis Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan

manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Akademis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi sumber referensi dan bacaan terutama dalam bidang ekonomi.
- b. Dapat memberikan kontribusi positif bagi akademis dan memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu ekonomi.
- c. Dapat memberikan pembelajaran dalam berfikir ilmiah, menambah pengetahuan, pengalaman serta menerapkan teori kedalam kasus yang nyata, dan wawasan khususnya dalam ilmu ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini di harapkan mungkin dapat meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan menjadi sumber daya bagi organisasi yang membutuhkan Dan mampu menjadi literatur ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.
- b. Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal memajukan kebijakan yang menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam bertujuan membantu menghilangkan kemiskinan yang ada di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan telah dibahas dalam berbagai karya baik berupa tugas akhir, tesis, skripsi, jurnal, dan buku-buku, baik sebagai judul khusus maupun sebagai sub judul. Dan untuk mendukung permasalahan yang

lebih relevan dan mendalam terhadap bahasan diatas, Peneliti berusaha mencari literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu mengenai efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan sebagai perbandingan dan pembelajaran, penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Kartiawati yang berjudul Analisis Efektktivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemsikinan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini membahas program bantuan PKH yang memberikan dampak kepada masyarakat miskin untuk mengurangi kemiskinan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang kemiskinan. Perbedaan penelitian sebelumnya membahas analisis Implementasi program keluarga harapan terhadap keluarga sangat miskin penerima bantuan. sedangkan penelitian ini membahas efektivitas Program BPNT dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten ponorogo.¹⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M. Indrawardy Hadiguna dengan berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan. Dalam penelitian ini membahas tentang serangkaian usaha dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, meningkatkan kinerja organisasi Sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, pendayagunaan

¹⁸ Kartiawati, “Analisis Efektivitas Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)” (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

sumber dana sosial serta terpenuhi kebutuhan dasar para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas penanggulangan kemiskinan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).¹⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yuliana Setiyawati dengan berjudul Program Pahlawan Ekonomi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Perspektif Ekonomi Islam. Dalam kajian ini program pahlawan ekonomi membahas sebagai program pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis komunitas yang dipilih oleh pemerintah kota Surabaya yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang berada di kecamatan kenjeran kota. Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas cara mengurangi kemiskinan. Perbedaan penelitian adalah penelitian sebelumnya membahas program pahlawan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan di kota Surabaya. Sedangkan, penelitian ini membahas Efektivitas Program BPNT dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rizki Rigeras Aldzuhri D dengan berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2019. Dalam penelitian ini membahas sejauh mana efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di kelurahan panggung kecamatan tegal timur kota tegal, kemudian

¹⁹ Indrawardy Hadiguna, "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022).

membahas factor penghambat efektivitas dalam pelaksanaan program keluarga harapan dan membahas solusi pemecahan permasalahan pada pelaksanaan program keluarga panggung kecamatan tegal timur kota tegal. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait efektivitas dalam pelaksanaan program pemerintah upaya pengentasan kemiskinan. Perbedaan penelitian adalah penelitian membahas tentang program keluarga harapan dalam pengentasan kemiskinan di kelurahan panggung kecamatan tegal di kota tegal Sedangkan, penelitian ini membahas Efektivitas Program BPNT Pengentasan Kemiskinan di kabupaten Ponorogo.²⁰

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Monika Yuliana dengan berjudul Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di Ponorogo. Dalam penelitian ini membahas pencapaian tujuan yang digunakan dalam peningkatan efektivitas PKH masyarakat Ponorogo belum efektif, karena bagi mengukur pencapaian tujuan dilihat dari sudut pandang target sasaran dalam penerimaan anggota PKH masih kurang tepat sasaran. Dan aspek proses manajemen indikator bantuan pada penerimaan PKH juga masih belum efektif. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan program pemerintah untuk masyarakat miskin. Perbedaan peneliti terdahulu adalah focus pada pembahasan efektivitas Program BPNT dalam pengentasan kemiskinan pada

²⁰ Rizki Rigeras Aldzuhri D, “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2019” (Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal, 2021).

kabupaten ponorogo.²¹

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Amin Nur Triana dengan berjudul Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pada Ketenaga Kerjaan KCP Ponorogo. Dalam penelitian ini membahas terkait BSU kepada para buruh dalam menghadapi dampak pandemic Covid-19 dalam haluan BSU adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam mnghadapi dampak pandemic Covid-19. Program ini program yang belum efekti selain itu di komunikasikan dengan tenancy yang lamban. Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas terkait Efektivitas pada pengelolaan program pemerintah. Perbedaan adalah peneliti terdahulu membahas tentang penyaluran program bantuan subsidi upah pada pegawai tenaga kerjaan BPJS sedangkan peneliti ini membahas terkait efektivitas Program BPNT dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.²²

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Eko Permana Septian dengan berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam penelitian ini membahas terkait peran dinas sosial dalam memberdayakan masyarakat miskin/kurang mampu melalui program keluarga harapan (PKH) di desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Bagaimana program pemberdayaan

²¹ Yuliana, "Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di Ponorogo."

²² Amin Nur Triana, "Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pada Peserta BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

masyarakat miskin yang dilakukan oleh kelompok masyarakat melalui program keluarga harapan dan bagaimanakah evaluasi pemberdayaan masyarakat miskin melalui program keluarga harapan di wilayah tersebut. Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas program dari pemerintah yang disalurkan oleh masyarakat miskin untuk dikelola sebaik mungkin. Perbedaan peneliti adalah peneliti terdahulu membahas peran dinas dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui program yang dipilih yaitu PKH sedangkan peneliti ini membahas terkait efektivitas Program BPNT dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten ponorogo.²³

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Wiwin Nuryana dengan berjudul Efektivitas Pemberian Bantuan Program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan) Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Sawoo Kabupaten Ponorogo. Dalam meneliti ini membahas terkait program jatim puspa pada penanganan dampak Covid-19 bertujuan untuk menaikkan produktivitas masyarakat yang berakibatkan sehingga dapat pulih, meningkat ketahanan sosial dan ekonominya serta dampak terjadi setelah penerapan pemberian bantuan dilakukan setelah penerimaan barang, dan dapat memahami rintangan yang berlangsung sebelum dan setelah pemberian bantuan terkait penerima barang yang telah diberikan kepada KPM. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas efektivitas program bantuan dalam menstabilkan pendapatan masyarakat. Perbedaan peneliti adalah peneliti

²³ Muhammad Eko Permana Septian, "Peran Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).

terdahulu membahas tentang efektivitas pemberian bantuan program jatim puspa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa sawoo kabupaten ponorogo sedangkan peneliti ini membahas terkait efektivitas Program BPNT dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten ponorogo.²⁴

Kesembilan, skripsi yang ditulis oleh Asrayanti dengan berjudul Efektivitas Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Dalam penelitian ini membahas bagaimana efektivitas kartu keluarga sejahtera dalam penanggulangan kemiskinan di deesa curio kecamatan curio kabupaten enrekang. Penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang menjadi kendala di dalam penggunaan kartu keluarga sejahtera dalam penanggulangan kemiskinan di desa curio kecamatan curio kabupaten enrekang. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang efektivitas salah satu program bantuan pemerintah. Perbedaan peneliti adalah peneliti sebelumnya membahas efektivitas pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Sedangkan, penelitian ini membahas Efektivitas Pada program BPNT dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.²⁵

Kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Puput Anggraini dengan berjudul Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Melalui

²⁴ Wiwin Nuryana, “Efektivitas Pemberian Bantuan Program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Perempuan) Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Sawoo Kabuapten Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

²⁵ Asrayanti, “Efektivitas Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Ngatabaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. Dalam penelitian membahas terkait upaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan di desa ngatabaru kecamatan biromaru kabupaten sigi. Selain itu, peneliti membahas warga miskin maka di serahkan ke desa, menjadi target sasaran tinjau ekonomi Syariah dalam program Keluarga Harapan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah khususnya di desa Ngatabaru. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang cara penanggulangan kemiskinan melalui program pemerintah untuk disalurkan masyarakat miskin. Perbedaan peneliti adalah peneliti sebelumnya membahas Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Ngatabaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. Sedangkan, penelitian ini membahas tentang Efektivitas Program BPNT Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.²⁶

Kesebelas, skripsi yang ditulis oleh Sri Aprilia Dewi dengan berjudul Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan. Dalam penelitian ini membahas terkait apa saja peran dinas sosial kabupaten aceh tengah dalam upaya pengentasan kemiskinan yang ditinjau dari indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan. Persamaan ini sama-sama membahas tentang upaya dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan. Perbedaan

²⁶ Puput Anggraini, “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Ngatabaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi” (Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019).

penelitian adalah peneliti sebelumnya membahas Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Indeks Keparahan Dan Kedalaman Kemiskinan. Sedangkan penelitian ini membahas Efektivitas Pada Program BPNT Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.²⁷

Keduabelas, skripsi yang ditulis oleh Dhiaul dengan berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Dalam penelitian ini membahas peran dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung dalam mengentaskan kemiskinan di kecamatan singkil kabupaten aceh singkil, dengan cara melakukan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat. Persamaan ini sama-sama membahas tentang upaya dinas sosial dalam mengentaskan kemiskinan dengan program bantuan dari pemerintah. Perbedaan penelitian adalah peneliti sebelumnya membahas Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kamapung Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan, penelitian ini membahas Efektivitas Program BPNT Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabuapten Ponorogo.²⁸

Ketigabelas, skripsi yang ditulis oleh Khoirunnisa Pulungan dengan berjudul Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam penelitian ini membahas terkait Lemabaga pengelola

²⁷ Sri Dewi Aprilia, "Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Indeks Keparahan Dan Kedalaman Kemiskinan" (Universitas Medan Area, 2022).

²⁸ Dhiaul Khali, "Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Dalam Mngentaskan Kmiskinan Di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

zakat resmi di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu dikatakan Badan Amil Zakat Nasional dalam penyaluran dan pendayagunaan dana zakat BAZNAS kabupaten Tapanuli selatan lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat konsumtif. Penyaluran dan pendayagunaan dana zakat yang kurang baik oleh pihak BAZNAS kabupaten Tapanuli selatan maupun pihak *mustahiq* akan menjadikan program dan usaha yang sudah di jalankan mengalami kendala bahkan berpotensi mengalami kegagalan. Maka dari itu peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan. Persamaan peneliti sama-sama membahas tentang menanggulangi kemiskinan pada pihak pemerintah. Perbedaan penelitian adalah peneliti sebelumnya membahas terkait Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan, penelitian ini membahas tentang Efektivitas Program BPNT Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo.²⁹

Keempatbelas, skripsi yang ditullis oleh Sabda Ariyan dengan berjudul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan. Dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana peran dinas sosial dalam penanganan kemiskinan di kecamatan tanjung balai asahan dan bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap peran dinas sosial kabupaten asahan dalam penanganan kemiskinan. Persamaan peneliti sama-sama membahas penanggulangan kemiskinan dengan

²⁹ Khoirunnisa Pulungan, “Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Tapanuli Selatan” (Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpun, 2022).

melibatkan Dinas Sosial. Perbedaan peneliti adalah peneliti sebelumnya membahas Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Efektivitas Program BPNT Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo.³⁰

kelima belas, artikel jurnal yang ditulis oleh Nida Faizatul Mustofa dengan berjudul Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini membahas terkait upaya pemerintah dalam mengatasi pandemic covid-19 yang mengakibatkan sejumlah sektor terdampak, salah satunya sektor perekonomian yaitu dengan mencangkan Program Bantuan Pemerintah bagi Usaha Mikro (BPUM). BPUM ini bertujuan untuk mendukung dan menjaga keberlangsungan usaha mikro serta sebagai bentuk penyelamatan ekonomi Nasional pada masa pandemic covid-19 yang mengancam perekonomian nasional. Persamaan peneliti sama-sama membahas tentang efektivitas dalam program Bantuan Pemerintah. Dengan mengukur pencapaian tujuan. Perbedaan penelitian adalah peneliti sebelumnya membahas terkait Efektivitas Program Bantuan Pemerintah bagi usaha Mikro. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.³¹

³⁰ Ariyan Sabda, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Asahan)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

³¹ Nida Faizatul Mustofa, Ratna Yunita, "Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Ponorogo," *Journal Of Economics and Business Research* 1, no. 2 (2021).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilaksanakan di suatu lapangan atau tempat lain yang ditunjukkan sebagai tempat untuk melakukan penelitian guna mengidentifikasi peristiwa-peristiwa tertentu yang sedang terjadi di lokasi tersebut.³² Penelitian lapangan yang digunakan sangat tepat karena metode ini merupakan metode untuk menyelidiki gejala-gejala yang terkait dengan Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *Postpositisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.³³ Dalam penelitian ini, partisipan bekerja untuk mengidentifikasi atau mengkonfirmasi fakta yang terjadi berdasarkan kata-kata, data-data dan gambar yang diperoleh untuk menggambarkan Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo agar bisa di pahami oleh pembaca atau orang lain.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengambil peran sebagai

³² H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),149.

³³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016),456.

instrument. Sebagai instrument manusia, penelitian kualitatif menentukan fokus penyelidikan, menentukan informan sebagai sumber data, menganalisis data, mengamankan data, dan menarik kesimpulan pada temuan utama mereka.³⁴ Tidak ada pilihan lain dalam penelitian kualitatif selain menjadikan peneliti sebagai instrumen penelitian utama. Peneliti hadir di lokasi penelitian yaitu pada wilayah Kabupaten Ponorogo yang menerima program BPNT.

3. Lokasi/Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan)

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penelitian ini bersifat lapangan (*Field research*) yaitu penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penetapan lokasi penelitian kualitatif, karena dengan di tetapkan lokasi penelitian, berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kabupaten Ponorogo yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai. Penulis memilih tempat penelitian ini karena terdapat permasalahan terkait program BPNT di Kabupaten Ponorogo, yaitu ketidaktepatan sasaran, dan keterlambatan waktu. Selain itu, penulis melihat adanya fenomena angka kemiskinan yang semakin meningkat per tahunnya. Sehingga dengan ketidaktepatan sasaran maka dapat mempengaruhi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Ponorogo.³⁵

4. Data dan Sumber Data

Data dari penelitian yang diajukan adalah data berdasarkan dari dari

³⁴ Sugiyono, 378.

³⁵ Sugiyono, 378.

data primer yaitu berdasarkan informasi dari pelaku informasi dari pelaku-pelaku utama dan juga arahan terjun secara langsung di lapangan yaitu dalam penelitian Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Ponorogo. Selain didukung dari adanya data primer juga adanya dari data sekunder yaitu melihat obyek orang lain di dalam penelitian ini. Dan pada sumber data dalam penelitian ini juga digunakan dengan data wawancara secara lisan sehingga dalam pengumpulan datanya disebut dengan responden dimana orang-orang dapat merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik itu pertanyaan tertulis ataupun lisan.

Sehingga dalam kajian penelitian ini mampu memberikan informasi secara akurat dan relevan yang dapat membantu informasi terhadap penelitian yang diajukan yaitu penelitian kualitatif. Selain dari adanya penjelasan diatas berdasarkan data dan sumber data, juga adanya dukungan melalui tahapan terjun secara langsung, maka adanya jenis data dan sumber data yang diperoleh diantaranya sebagai berikut:

a. Narasumber (Informan)

Dalam penelitian kualitatif ini sumber data bisa dikatakan responden dikarenakan adanya respon secara langsung dari orang yang diberi pertanyaan dengan menjawab secara lisan kepada peneliti. Dan dalam penelitian ini juga adanya pihak narasumber yang di wawancarai untuk mendapatkan informasi terkait Program Bantuan Pangan Non Tunai. Oleh karena itu disebut dengan informan atau orang yang memberikan informasi, sumber informasi, ataupun sumber data terhadap subyek yang

ditelitinya karena sebagai data primer atau pelaku utama guna memberikan informasi yang diberikan, terhadap kajian data yang relevan dan akurat sehingga peneliti tidak hanya melakukan penalaran saja akan tetapi berdasarkan data dan sumber data yang fakta. Informasi didapatkan di Kabupaten Ponorogo ialah bentuk data primer studi ini. Data ini didapatkan melalui *interview* dan pengamatan pendamping BPNT, dan Masyarakat Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai.

b. Peristiwa atau Aktivitas

Data atau informasi dalam penelitian ini juga menggunakan peristiwa yang terjadi, dikarenakan dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu adanya permasalahan yang terjadi di Bantuan Pangan Non Tunai berdasarkan realisasi pemberian bantuannya sampai ke pencairan, efektivitas pemberian bantuannya, kendala dan juga dalam penelitian ini didukung dengan terjun secara langsung ke lapangan berdasarkan pengamatan terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subyek yang ditelitinya.

c. Dokumen atau Arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu, yang bisa disebut juga dengan data sekunder berdasarkan kajian dokumen, arsip ataupun buku berdasarkan efektivitas bantuan program BPNT di Kabupaten Ponorogo. Sehingga sangat penting terhadap kajian sumber data dalam penelitian

kualitatif.

Sehingga dalam adanya data dan sumber data diatas juga adanya keterkaitan dari rumusan masalah baik dari data primer ataupun dari data sekunder, dan dalam penelitian ini juga adanya pendekatan secara wawancara *face to face* dalam pendekatan penelitian dengan pertanyaan mengenai program BPNT, kendala menerima bantuan penganalisisnya seperti apa setelah adanya kajian berdasarkan data dan sumber datanya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk menangani data yang diperlukan.³⁶ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam analisis penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran pasti suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil dari observasi dapat berupa aktivitas, kejadian, peristiwa,

³⁶ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013),174.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015),79.

objek, kondisi atau suasana tertentu.³⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung pada masyarakat miskin yang menerima keluarga manfaat pada masyarakat ponorogo supaya mengetahui keadaan lingkungan dan aktivitas apa saja yang dilakukan.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.³⁹ Metode ini digunakan peneliti untuk menggali data dari informan. Wawancara dalam penelitian ini adalah melakukan tanya jawab dengan Masyarakat miskin yang menerima Bantuan BPNT pada masyarakat Ponorogo dan Pendamping Desa maupun Kecamatan sebagai sumber data primer di penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis.⁴⁰ Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan tambahan pada penelitian kualitatif paska Teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan upaya memperoleh data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, foto, dan hal-hak yang terkait dengan objek penelitian.

³⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2004), 33.

³⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 180.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015),

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Adapun Teknik yang akan digunakan dalam pengolahan data pada pelaksanaan penelitian ini yaitu:

- a. Pengoreksian data (*editing*), merupakan mengontrol kembali semua data yang diperoleh terpenting dari segi keseluruhan, keterbacaan, kejelasan antara satu dengan yang lain, relevansi, dan keseragaman satuan atau kelompok data. Mengedit merupakan pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah di serahkan oleh pengumpul data. *Editing* bertujuan dalam menurunkan kesalahan atau kekurangan yang ada pada daftar pertanyaan yang sudah di selesaikan mencapai sejauh mungkin.
- b. Pengorganisasian data, merupakan membuat dan mensistematikan pertanyaan-pertanyaan pada perumusan masalah.
- c. Analisis data, adalah metode menyusun data supaya dapat ditafsirkan. Proses ini dilakukan mulai dari pengumpulan data dengan terus menerus dilakukan verifikasi maka dari itu, kesimpulan akhir di dapat setelah seluruh data yang dibutuhkan dan diperoleh.⁴¹

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis dan mendalami tingkat kualitas dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilaksanakan peneliti, data dapat

⁴¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2010),152.

disebut valid / sudah teruji kebenarannya jika sesuai antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan uji kredibilitas. Dengan menggunakan metode triangulasi maka uji kredibilitas data atau tingkat kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini dilaksanakan. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data yang dari beragam sumber dengan jenis cara dan berbagai waktu.⁴²

Peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dimana peneliti menggunakan lebih dari satu narasumber 10-15 Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Ponorogo dalam Pengentasan Kemiskinan.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang dilaksanakan untuk menyusun, mengorganisasikan dan menjabarkan data yang diperoleh secara sistem agar mudah ditafsirkan diri sendiri dan orang lain.⁴³ Peneliti mengambil metode berfikir induktif pada menganalisis data. Metode induktif adalah cara memaparkan data dari paparan data lalu kearah teori.⁴⁴ Pada penelitian ini, penelitian menganalisis data yang diperoleh pada bentuk uraian lalu data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai Efektivitas Program Bantuan Non Pangan kepada masyarakat miskin yang akan dibahas dan ditarik kesimpulan.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 273.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 224.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 79.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan disusun menjadi lima bab untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini. Ada sub-bab dalam bab ini yang merupakan urutan pembahasan penelitian. Berikut ini adalah pembahasan sistematis tentang penyusunan laporan penelitian:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas beberapa kategori, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selain itu, juga membahas penelitian sebelumnya, Teknik penelitian, dan pembahasan sistematis.

Bab II Kajian Teori, bab ini membahas tentang landasan teori efektivitas, yang meliputi pengertian efektivitas, ukuran efektivitas pada Bantuan Pangan Non Tunai, kemiskinan, bentuk dan jenis kemiskinan, factor-faktor penyebab kemiskinan, strategi pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan dalam konteks ekonomi islam.

Bab III Paparan Data, bab ini membahas mengenai profil bagian yang menyajikan data ini dan pendukung yang dilakukan dalam penelitian meliputi: data inti yang ditanyakan pada rumusan masalah, dan data pendukung yaitu berupa pengantar.

Bab IV Pembahasan dan Analisis, bab ini membahas analisis data yang meliputi analisis bantuan pangan non tunai.

Bab V Penutup, bab ini merupakan keseluruhan rangkaian pembahasan penelitian, yakni berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif yang bermakna berasal dari bahasa Inggris yaitu hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efeknya.⁴⁵ Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan.⁴⁶ Efektivitas yang berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Menurut Soewarno dikemukakan bahwa teori efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas diartikan sebagai hasil yang tepat guna.⁴⁷ Jadi efektivitas adalah kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas merupakan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.

Menurut Hasan Sadidi dalam ensiklopedia Bahasa Indonesia, efektivitas memiliki arti menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan. Suatu

⁴⁵ Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer Dan Kosa Kata Baru (Surabaya: Mekar, 2008),33.

⁴⁶ Suwarno Hanadayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen / Soewarno Handayaningrat (Jakarta: Gunung Agung, 1994),167.

⁴⁷ Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 23.

pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun menurut Handyaningrat efektivitas merupakan bentuk pengukuran dalam tercapainya suatu sasaran tertentu, yaitu tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Ali Manajemen Peter F. Drucker, efektif merupakan pekerjaan yang dilakukan secara benar, sedangkan efisien ialah telah menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Jadi efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam memiliki tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁸

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjukkan pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai suatu ukuran mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya.⁴⁹

Dari beberapa pendapat beberapa ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diharapkan. Disebut efektif apabila tercapainya sasaran sebagai tingkat kemampuan suatu Lembaga atau organisasi untuk dapat

⁴⁸ Ajeng Wahyuni Afif Izam Taufik, "Efektivitas Pemberdayaan Zakat Produktif Di Laboratorium Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf IAIN Ponorogo," *Nidhomiya : Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 1, no. 1 (2022): 5.

⁴⁹ Ulber Silalahi, *Asas-Asas Manajemen* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 416–17.

melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya.⁵⁰

2. Indikator Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitasnya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.⁵¹

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana dan tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai dengan hasil nyata yang telah diwujudkan dalam pelaksanaan di masyarakat. namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan tujuan sehingga tidak tercapai, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.⁵²

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada teori efektivitas suatu program yang dikemukakan oleh Richard M. Steers, menurutnya tolak ukur efektivitas dari sebuah program dapat diketahui dari beberapa indikator

⁵⁰ Muzakir, Said Abadi, "Efektivitas Publisitas Produk Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Caban Ponorogo)," *Of Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2022): 47.

⁵¹ Agung Aldino Putra, "Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama)," *Jurnal Katalogis* 6, no. 8 (2018): 3.

⁵² Rizal Khadafi Mutiarin, "Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten GunungKidul," *Of Governance And Public Policy* 4, no. 2 (2017): 334.

berikut ini:

1) Ketepatan sasaran program

Sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada penelitian ini ketepatan sasaran digunakan sebagai penentu keputusan siapa saja peserta penerima program BPNT, apabila sudah sesuai dengan kriteria penerimanya yaitu kelompok keluarga penerima manfaat yang berhak mendapatkan program tersebut. Jadi, ketepatan sasaran program merupakan langkah awal kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program yang mencakup tersedianya dana, tersedianya pedoman umum dan persiapan sosialisasi.

2) Sosialisasi program

Kemampuan penyelenggaraan program di dalam melakukan sosialisasi program maka informasi mengenai pelaksanaan program bisa tersampaikan untuk masyarakat pada umumnya serta sasaran peserta program pada khususnya. Sosialisasi tersebut ditujukan kepada keluarga penerima manfaat dan pendamping program BPNT agar informasi yang diberikan dapat tersampaikan. Jadi, sosialisasi program merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yang dilakukan verifikasi data RTM penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi mengenai tujuan BPNT, hak dan kewajiban RTM, serta dilakukannya penyaluran dana BPNT kepada RTM penerima bantuan.

3) Tujuan program

Sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksana program dengan

tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar tujuan sebuah program sesuai dengan hasil yang diharapkan maka dibutuhkan tahapan-tahapan, baik tahapan pencapaian maupun tahapan prioritasnya. Dengan begitu tujuan suatu program tersebut akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Maka, dana yang diterima oleh RTM merupakan dana yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan yang bergizi.

4) Pemantauan program

Kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.⁵³ Pengamatan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mengamati pelaksanaan program dan proyek, dalam waktu yang sedang berjalan, serta mencoba memperbaiki kesalahan agar pada akhir penyelesaian, program diharapkan dapat dilaksanakan dengan benar. Melalui pemantauan diperoleh data perkembangan selama pelaksanaan program, jika data hasil pemantauan menunjukkan adanya penyimpangan maka menjadi umpan balik untuk perbaikan. Dengan demikian pemantauan sekaligus berfungsi sebagai sarana pengendalian pelaksanaan, agar program tetap berjalan dalam jalur yang direncanakan.⁵⁴

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas

⁵³ Budiani Ni Wayan, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Bhakti' Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar," *Jurnal Ekonomi Dan Sosial* 2, no. 1 (2017): 34.

⁵⁴ Prijambodo, *Monitoring Dan Evaluasi* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014), 10.

organisasi menuntut terdapatnya system pengawasan dan pengendalian.⁵⁵ Jadi, pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

3. Ukuran Efektivitas BPNT

Efektivitas dapat diukur melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program bantuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berikut indikator keberhasilan Bnatuan Pangan Non Tunai (BPNT):

a. Tepat sasaran

Tepat sasaran yaitu dilihat dari adanya kesesuaian sasaran program dengan tujuan yang telah ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang kongkrit, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif.

b. Tepat waktu

Merupakan jangka waktu pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam tata kelola *e-Warong* adalah proses pencairan dana bantuan sosial melalui *e-Warong*. Harus dapat dicairkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga dapat menentukan efektif atau tidaknya program tersebut.⁵⁶

⁵⁵ Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).

⁵⁶ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Makassar: Kencana, 2007), 125–26.

c. Tepat Jumlah

Merupakan jumlah uang yang diterima oleh peserta BPNT sesuai dengan besaran bantuan komponen yang didapatkan.

B. Kendala

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.⁵⁷ Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam bukunya kamus lengkap bahasa Indonesia, kendala adalah, menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran, rintangan, halangan.⁵⁸

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala adalah keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran. setiap organisasi kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja yang tinggi. Seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan berarti kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbarui.

⁵⁷ Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2012), 667.

⁵⁸ Pius dan Danu Prasetya Abdillah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arloka, 2016), 329.

C. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki dari miskin. Penduduk pada umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat Pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraannya sehingga menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh keterbatasannya sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat Pendidikan formal maupun nonformal dan membawa konsekuensi terhadap Pendidikan informal yang rendah.⁵⁹ Dapat disimpulkan bahwa miskin berarti keadaan yang berada dimana mengharuskan bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhannya karena kekurangan atau lemah dalam materi. Karena kekurangan materi orang-orang miskin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi, memperoleh Pendidikan yang layak, modal kerja dan sejumlah lainnya.

Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara sosial kemiskinan diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan produktivitas. Dan sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses terhadap kekuasaan.⁶⁰

Kemiskinan dapat diartikan bahwa suatu keadaan dimana seseorang

196 ⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000).

⁶⁰ Tadjuddin Noer Effendi Effendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1993), 203.

keluarga atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada umumnya. Penduduk miskin umumnya berada pada daerah pedesaan, hal ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Hans Dieter dan Suwardi mengatakan bahwa kemiskinan yang ada di kampung dapat digolongkan baik kemiskinan tempat tinggal maupun kemiskinan penduduk. Kemiskinan tempat tinggal kondisinya sebagai tempat tidak teratur sedangkan kemiskinan penduduk karena yang ditinjau dari segi sosial dan ekonomi sangat rendah termasuk penyediaan air dan listrik beserta prasarana minimum.⁶¹

b. Bentuk Kemiskinan

Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1) Kemiskinan Absolut

Merupakan pendapatan di bawah garis kemiskinan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan Pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

2) Kemiskinan Relatif

Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut

⁶¹ M. Yani Balaka dan Wali Aya Rumbia Cica Sartika, "Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna," *Jurnal Ekonomi* 1, no. 1 (2016): 108.

sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitar

3) Kemiskinan Kultural

Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang di sebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

4) Kemiskinan Struktural

Situasi miskin yang di sebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politi yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.⁶²

c. Pengentasan Kemiskinan

Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014.⁶³

Kemiskinan di manapun beradanya akan menjadi lawan atau musuh bagi negara di berbagai belahan dunia. Upaya dalam penanganan mengenai persoalan kemiskinan terus menerus dilakukan. Di beberapa daerah

⁶² Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 3.

⁶³ TNP2K, "Program Penanggulangan Kemiskinan," n.d.

penanganan mengenai kemiskinan tidak lagi dilakukan secara parsial namun holistic. Terdapat strategi pengentasan kemiskinan yaitu:

1. Kebijakan program

Kebijakan program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan merupakan yang mendasar dan strategi sebagai daerah. Untuk mewujudkan program pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan asal-asalan atau dalam bentuk instan karena terkait bahwa jenis, tingkat dan kualitas kemiskinan yang bervariasi, sehingga pemerintah perlu menyediakan berbagai macam program yang dapat dipilih disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Sumber daya manusia

Keterlibatan pelaksana atau sumber daya manusia dalam pengentasan kemiskinan menjadi bagian penting dan sangat menentukan. Karena banyak kejadian pelaksana program bukan seseorang mengerti benar dengan persoalan kemiskinan. Maka dari itu dimulai dari rekrutmen sampai dengan pelatihan atau pendidikannya sebagai perlu dilakukan seleksi.

3. Pendataan

Akurasi data tentang kemiskinan menjadi bagian yang sangat penting terkait dengan pilihan program yang harus diputuskan untuk di implementasikan yang tentunya disesuaikan dengan kondisi situasi yang ada.

4. Target

Keberagaman tentang target atau sasaran program sangatlah bervariasi, maka dalam pelaksanaan program perlu dilakukan secara cermat.⁶⁴



⁶⁴ Dr. Dadang Solihin, Administrasi Pembangunan (Surabaya: Jakad Media, 2021), 54.

BAB III

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Geografis Wilayah Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Ponorogo. Ponorogo adalah sebuah daerah di kawasan Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota provinsi, dan sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. Wilayah kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di sebelah Utara. Di sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).⁶⁵

Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 1.371,78 Km² dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi dua bagian, yakni dataran tinggi, meliputi Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya yakni wilayah dataran rendah. Sebagian besar luas yang ada berada di kawasan lahan sawah, namun sebagian besar dimanfaatkan untuk pekarangan. Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan yang menjadi 281 desa dan 26 kelurahan.

⁶⁵ Badan Pusat Kabupaten Ponorogo Statistik, *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2019* (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo), 3.

2. Demografi Kabupaten Ponorogo

1) Komposisi penduduk berdasarkan kelamin

Data total penduduk menurut BPS Kabupaten Ponorogo berpenduduk sebanyak 949.318 jiwa. Kecamatan Ponorogo, tercantum mempunyai jumlah penduduk terbesar, yaitu 77.888 jiwa, diikuti kecamatan Babadan 66.877 jiwa dan kecamatan Ngrayun sebanyak 56.683 jiwa.

Tabel 1.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelamin

Jenis Kelamin	Total
Laki-laki	474.257
Perempuan	475.061
Jumlah	949.318

Sumber : Kabupaten Ponorogo dalam Angka 2021 (data diolah)

2) Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Banyaknya sarana dan prasarana sebagai penunjang yang ada di wilayah Ponorogo dapat mempengaruhi tingkat Pendidikan. Dalam melihat komposisi penduduk Kabupaten Ponorogo menurut tingkat Pendidikan dapat memperhatikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Komposisi Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Total
Tamat SD/Sederajat	227.758
Tamat SMP/ Sederajat	117.829
Tamat SMA/Sederajat	64.722
Tamat SMK/Sederajat	52.692
Tamat DI/II/III/Akademi	9.695
Tamat S1/Sederajat	32.554
Jumlah	505.250

Sumber: Kabupaten Ponorogo dalam angka 2022 (data diolah)

3) Sarana dan Prasarana Umum Masyarakat

Sarana dan prasarana adalah hal yang digunakan oleh masyarakat dengan tersedianya, terpenuhi sarana dan prasarana pada masyarakat akan membantu masyarakat dalam mendukung semua aktivitas yang dilaksanakan. Dengan adanya sarana dan prasarana pokok seperti sarana Pendidikan, sarana peribadatan, sarana komunikasi dan informasi, akan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas, kebutuhan hidupnya. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana

No	Prasarana	Jumlah
1.	TK/PAUD	444 Unit
2.	Sekolah SD	591 Unit
3.	Sekolah MI	105 Unit
4.	Sekolah SMP	92 Unit
5.	Sekolah MTS	86 Unit
6.	Sekolah SMA	27 Unit
7.	Sekolah SMK	43 Unit
8.	Sekolah MA	64 Unit
9.	Rumah Sakit	5 Unit
10.	Rumah Sakit Bersalin	0
11.	PT	9 Unit
12.	Poliklinik	25 Unit
13.	Puskesmas	34 Unit
14.	Masjid	995 Unit
15.	Mushola	5.705 Unit
16.	Gereja	50 Unit
17.	Pura	17 Unit
18.	Vihara	0 Unit

3. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Ponorogo

Masyarakat di kawasan Kabupaten Ponorogo merupakan suku yang homogen di mana mayoritas penduduknya adalah keturunan dari suku Jawa. Kabupaten Ponorogo memiliki ciri khas budaya yakni kesenian reog merupakan satu-satunya unsur yang mampu membuat identitas suatu daerah. Nilai-nilai agama yang dimotivasi secara religious pada perkembangan kehidupan masyarakat menjadi kekayaan budaya yang perlu mendapatkan tempat tersendiri sehingga penanaman nilai moral yang mendukung pemerintah daerah.

Kesenian Reog merupakan budaya asli dari Ponorogo yang telah diperbarui melalui pembangunan wilayah perencanaan dan kabupaten yang modern di daerah tersebut. Dengan demikian, ini dapat berfungsi sebagai batu loncatan pertama dan terpenting bagi orang-orang di daerah tersebut selama konstruksi. Penguatan pada kesenian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi perkembangan di sekitar wilayah perencanaan pada perkembangan.⁶⁶

4. Konsep Dasar Program Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan/E-Warong.⁶⁷

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2019* (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2018).

⁶⁷ Ni Wayan, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Bhakti' Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar."

A. Tujuan dan Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

a. Tujuan Program BPNT adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- 2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat.
- 3) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerima bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat.
- 4) Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- 5) Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 6) Mendorong usaha eceran rakyat.

b. Manfaat Program BPNT adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penganggulangan kemiskinan.
- 2) Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- 3) Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

c. Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Menurut peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kriteria dan persyaratan penerima Bantuan Pangan Non Tunai yaitu sebagai berikut:

- a. Bantuan Pangan Non Tunai disalurkan di lokasi dengan kriteria:
 - 1) Tersambung dengan jaringan internet.
 - 2) Terdapat e-Warong.
 - 3) E-Warong sebagai penyalur BPNT dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peserta penerima Bantuan Pangan Non Tunai dipersyaratkan sebagai berikut:
 - 1) Keluarga Penerima Manfaat yang tercantumkan dalam data Pemerlu Kesejahteraan Sosial dan atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
 - 2) Tergolong peserta Keluarga Penerima manfaat BPNT yaitu diutamakan berasal dari peserta program keluarga harapan dalam data PPKS dan atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.⁶⁸

Kriteria miskin menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu antara lain:

⁶⁸ “Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Pasal (3), Pasal (4), Dan Pasal (5),” n.d.

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter perorangan.
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari kayu/bambu.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal tidak bertembok.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,00 per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tama SD/tamat SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,00 seperti sepeda motor kredit/non kredit,

emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin.⁶⁹

d. Besaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan bantuan sosial pangan senilai Rp 110.000 yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada masing-masing KPM setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik. Pada 2019, BPNT digunakan hanya untuk membeli beras atau telur *E-Warong*.⁷⁰ Kartu yang digunakan dalam penyaluran BPNT adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yaitu kartu debit atas nama pengurus keluarga. KKS berfungsi sebagai wallet uang elektronik sehingga pada saat pemanfaatan bansos wajib dibawa oleh KPM.

e. Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Penyaluran BPNT terdiri dari dua tahap, pertama adalah Transfer Dana Bantuan Pangan dan berikutnya Notifikasi kepada KPM.

a. Transfer Dana Bantuan Pangan

⁶⁹ Nur Halimah, "Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Positif Dan Hukum Islam" (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019), 27.

⁷⁰ TNP2K, "Rangkuman Informasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)" 2019,

- 1) Bank penyalur membukukan akun elektronik bantuan pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan perubahan yang diterima dari Kementrian Sosial.
 - 2) Pemindahan bukuan dana bantuan pangan dari rekening Kementrian Sosial pada Bank Penyalur ke akun Elektronik Bantuan Pangan KPM dilakukan 30 dari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementrian Sosial di Bank Penyalur.
 - 3) Transfer dan bantuan ke akun Elektronik Bantuan Pangan KPM tidak dikenakan biaya administrasi.
 - 4) Aktiva dilakukan melalui sistem Bank pada hari yang sama dengan transfer dana bantuan pangan ke akun Elektronik Bantuan Pangan KPM.
- b. Notifikasi kepada KPM
- 1) Bank penyalur memberikan notifikasi dana bantuan pangan yang sudah di transfer ke akun Elektronik Bantuan Pangan KPM antara lain dapat berupa SMS ke nomoe HP KTM atau bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengonfirmasikan ke KPM hal-hal terkait Bantuan Pangan Non Tunai.
 - 2) Biaya notifikasi menjadi tanggung jawab Bank Penyalur dan tidak memotong besaran Bantuan Pangan.

3) Pembelian bahan pangan oleh KPM pada *e-warong*.⁷¹

5. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Ponorogo

Tabel 4.2 Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Ponorogo Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah KPM
Babadan	714
Badegan	2237
Balong	2045
Bungkal	1509
Jambon	3209
Jenangan	1205
Jetis	1261
Kauman	2073
Mlarak	1556
Ngebel	1482
Ngrayun	7019
Ponorogo	982
Pudak	726
Pulung	2205
Sambit	1689
Sampung	1284
Sawoo	3874
Siman	853
Slahung	2978
Sooko	1307
Sukorejo	1795
Total	42003

Sumber: data KPM BPNT Kabupaten Ponorogo 2022

⁷¹ Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum*, n.d., 58.

Dari data tersebut, mampu dilihat bahwa penerima bantuan BPNT pada Kabupaten Ponorogo terbanyak yaitu pada kecamatan Ngrayun sebanyak 7019, kemudian diikuti oleh kecamatan Sawoo sebesar 3874 dan kecamatan Jambon sebesar 3209. Kemudian untuk daerah yang mendapat bantuan BPNT paling sedikit berada pada kecamatan Babadan sebanyak 714 dan pudak 726. Dari sekian banyak jumlah peserta penerima Program Bantuan Pangan dibutuhkan adanya pendamping BPNT. Melalui pendamping BPNT, peserta BPNT diberikan arahan teknis dan informasi mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai dari pendataan peserta BPNT.

B. Data

1. Realisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai yang berada di daerah Ponorogo. BPNT merupakan program bantuan untuk penanganan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo yang dilaksanakan sejak tahun 2019. Di mana program tersebut sebelumnya merupakan Subsidi Rastra. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh pak fandi sebagai salah satu selaku pendamping di Ponorogo, beliau mengatakan bahwa:

“Mulai dari awal masuknya program BPNT merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) sekitar tahun 2018. Program BPNT upaya pemerintah untuk melakukan perubahan bentuk penyaluran menjadi non tunai melalui penggunaan kartu elektronik yaitu Kartu Keluarga Sejahtera yang disebut KKS dan diberikan kepada para KPM untuk penerimaan bantuan BPNT dengan saldo awal Rp.

110.000 pembelian barangnya hanya untuk beras dengan telur, penerima Kartu Penerima Manfaat (KPM) tidak bisa membelanjakan untuk kebutuhan lain”.⁷²

Pada saat awal pelaksanaan program ini jumlah penerima bantuan tersebut berubah-ubah karna adanya verifikasi data dan penambahan Keluarga Penerima Masyarakat (KPM). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari ibu Elis selaku penanggung jawab agen yakni:

“Dari data yang saya terima dari pihak per kecamatan bahwasannya jumlah KPM penerima program BPNT di wilayah Kabupaten Ponorogo mengalami penambahan jumlah penerima bantuan dan penyusutan dikarenakan adanya KPM yang meninggal ataupun pindah sehingga bantuan tidak bisa diambil dan dilakukan pencabutan dari kepesertaan penerima bantuan”.⁷³

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penerima bantuan di Kabupaten Ponorogo mengalami perubahan dan tidak bisa ditentukan, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan dan penyusutan jumlah penerima. Pada proses penentuan penerima BPNT di wilayah Kabupaten Ponorogo, berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat diakses oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui aplikasi yang telah ditentukan. Hal tersebut di perkuat dengan pernyataan dari Bapak Ukib selaku salah satu pendamping desa di Kabupaten Ponorogo, ia menyatakan sebagai berikut:

“Untuk menentukan penerima program BPNT sebelumnya dilakukan terlebih dahulu pendataan oleh pendamping desa, data tersebut diserahkan kepada pihak desa selanjutnya akan dimasukkan lewat aplikasi, proses selanjutnya nama-nama yang terdaftar akan masuk di DTKS, kemudian dari DTKS tersebut akan ditentukan mendapatkan bantuan apa, dan yang menentukan adalah dari pihak kementerian sosial”.⁷⁴

⁷² Fandi, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 11 W-24-III/23

⁷³ Elis, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 13 W-24-III/23

⁷⁴ Ukib, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 12 W-24-III/23

Sebagaimana peneliti melakukan wawancara dengan ibu Parti selaku penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): “Dulu saya di data oleh pihak RT, dengan mengumpulkan persyaratan KTP, KK, dan kartu KPM itu saya diberikan dari pihak kelurahan, untuk pendaftaran BPNT”.⁷⁵

Hal ini sebanding dengan penjelasan bu Sumiyem sebagai penerima BPNT: “Zaman dulu pak RT yang memberitau kepada masyarakatnya bahwa ada program pemerintah yang menunjukkan persyaratan KK, KTP, KPM. Tapi tetangga saya ada yang langsung dipilih dari pihak desa”.⁷⁶

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya penentuan calon Daftar Penerima Manfaat (DPM) dilakukan oleh pihak kementerian sosial setelah dilakukan pengisian data di aplikasi, dan pihak pendamping hanya melakukan pendataan dan mengusulkan kepada pihak desa.

2. Kendala Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan

Kendala adalah keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Bahwa kendala adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran. Sejak awal adanya diberlakukan program BPNT hingga saat ini, tidak dapat dipungkiri setiap *e-warong* maupun dari pendamping BPNT pasti memiliki kendala dalam menyalurkan program BPNT baik dari sisi manapun. untuk

⁷⁵ Parti, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 01 W-24-III/23

⁷⁶ Sumiyem, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 02 W-24-

mengetahui maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Fandi sebagai pendamping kecamatan:

“Kami para pendamping melakukan evaluasi kinerja dilapangan, agar tau kendala yang dihadapi dan juga untuk peningkatan guna mencapai ketepatan sasaran dan KPM bisa mendapatkan bantuannya seacara utuh dan berkualitas terbaik, dan harga terbaik, evaluasi yang dilakukan setiap dua atau tiga bulan sekali, biasanya melakukan rapat dikantor yang telah disediakan. Dalam rapat membahas kendala yang terjadi seperti kesulitan pendamping untuk kelapangan, kendala KPM yang sudah tidak layak dapat mendapatkan bantuan dan juga mengenai kerjasama komunikasi antara pendamping dengan *e-warong*”.⁷⁷

Hasil wawancara dengan bu Elis selaku pemilik *E-warong* sebagai berikut:

“Rapat yang diadakan setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, bertempat di kantor kecamatan masing-masing, rapatnya ini para pemilik *E-warong* dan pendamping sebagai koordinator rapat, pembahasannya itu seperti kendala dan juga solusi tepat dalam menanganinya serta penilaian terhadap *e-warong*, kendala yang dibahas yaitu saat pencairan bantuan, KPM yang bantuannya dihentikan, dan bahan makanan yang mencakup kualitas dan harga yang dijual ke KPM, dan kendala jika ada oknum yang mencurigakan”.⁷⁸

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Rini selaku pemilik *E-warong*:

“Masalah yang sering terjadi keterlambatan bantuan yang bisa hampir sebulan. Setiap sebulan sekali pasti di cek terus kartu KPM kalo udah turun langsung dikasih tahu, kalau emang ada KPM saat pencairan tapi bantuannya belum turun, saya langsung laporkan ke pandamping bahwa KPM A belum turun bantuan biar langsung di cek. Untuk bahan makanan sendiri memang saya belinya berbeda tempat mencari kualitas paling baik dengan harga yang terjangkau, jika petani sekitar sedang kosong saya cari ke pasar indukbuat KPM nanti. Memang ada *E-warong* yang nakal mainin harga terus juga kualitasnya biasa saja, untuk hal itu diserahkan ke pendamping karena buka tugas saya. Selanjutnya mengenai oknum yang mencurigakan memang ada yang datang ke warung saya bawa kartu KPM banyak dengan alasan mau ngecek saldo apakah sudah turun, ternyata oknum itu ingin mencairkan di warung saya untuk mendapatkan untung lebih karena kan nanti yang pegang si oknum itu, dia melebihi

⁷⁷ Fandi, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 12 W-24-III/23

⁷⁸ Elis, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 13 W-24-III/23

harga dan juga mengurangi bahan makanan dari penukaran saldo BPNT”.⁷⁹

Dilihat dari beberapa indikator yakni ketepatan sasaran dan pemantauan program.

1. Ketepatan sasaran

Ada beberapa kriteria yang dimanfaatkan oleh pihak pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai. Faktor ketepatan sasaran di Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan kriteria penerima Bantuan dan masih ada KPM yang tidak layak mendapatkan bantuan dibuktikan wawancara kepada Bapak Eko pendamping yaitu:

“Banyak wilayah yang belum tepat sasaran masih kurang efektif dalam hal ini, karna kurangnya pengawasan program BPNT, perlunya dipantau lebih jauh seperti pihak pemerintah harus update informasi tentang kondisi Keluarga Penerima Manfaat, banyak permasalahan yang sering muncul seperti pihak penerimamanfaat yang dulunya tidak mampu sekarang sudah mampu”.⁸⁰

Ibu Ukib juga mengatakan bahwa program BPNT ini belum tepat sasaran, ia mengatakan bahwa: “Belum tepat sasaran, karena pihak Dinas Sosial Ponorogo tidak pendataan secara langsung, melainkan oleh pihak Kelurahan mbak, jadi kami hanya sekedar mendampingi saja”.⁸¹

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat diberikan kesimpulan bahwa kabupaten Ponorogo masyarakat pada KPM belum tepat sasaran karena pendataan diperoleh masyarakat miskin dari pihak kelurahan/desa. Kurangnya pemantaun dari pemerintah untuk selalu

⁷⁹Rini, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 15 W-24-III/23

⁸⁰Eko, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 14 W-24-III/23

⁸¹Ukib, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 11 W-24-III/23

update kondisi Keluarga Masyarakat Miskin/KPM.

2. Pemantauan program

Dalam pemantauan program terdapat kendala dari selaku pendamping BPNT yaitu Bapak Ukib adapun hasil wawancara:

“Kendala yang saya hadapi dalam pelaksanaan pemantauan pada saat penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang dananya tidak keluar atau kosong, setelah dilakukan pengecekan KKS ternyata data diri tidak sesuai, inilah tujuan utama yang dilakukannya pemantauan untuk mengantisipasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan program, selain itu kendala lainnya KPM yang sudah dihubungi”.⁸²

Diperkuat dengan penjelasan ibu jatmi sebagai penerima BPNT mengatakan: “ya mbak, KPM PKH maupun sembako disini masih banyak yang belum bisa menjalankan kartu ATM saat pencairan dana, jadi mereka menitip ke saya waktu pencairan, sekarang yang handle waktu pencairan saya sendiri mbk, jadi untuk kartu ATM beserta pawordnya dikumpulkan ke saya, lalu nanti saya cairkan “ Berdasarkan hasil wawancara diatas kendala dalam pemantauan program yang dihadapi terjadi saat penyaluran bantuan kepada KPM terdapat KPM yang dana pada KKS kosong, ternyata setelah dilakukannya pengecekan data diri tidak sesuai, dan pengoperasikan mesin ATM, selain itu kendala lain saat pemantauan KPM yang sulit untuk dihubungi.

⁸²Ukib, Wawancara, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 11-W-24-III/23

3. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan

Tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, membagikan gizi yang lebih seimbang, lebih banyak opsi dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila rencana yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Agar suatu program berjalan dengan lancar diperlukan adanya 4 indikator, yaitu ketepatan sasaran, tepat waktu, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

1. Ketepatan sasaran

Ketepatan sasaran dari pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan masyarakat yang memang membutuhkan bantuan melalui program tersebut. Kriteria yang mendapatkan bantuan ini diantaranya keluarga yang berpendapatan rendah yang tidak berpenghasilan tetap, memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya, dan rumah dengan kondisi tidak layak huni. Sasaran pada BPNT dari aspek ketepatan sasaran. Pada aspek sasaran Bapak Eko selaku Pendamping BPNT di Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa masyarakat yang menerima bantuan ini sudah tepat sasarannya, berikut hasil wawancaranya:

“Menurut saya sudah tepat sasaran mbak, karena untuk seluruh penerima bantuan sosial BPNT harus terdaftar di DTKS dan untuk

menentukan masuk di yang masuk di DTKS merupakan keluarga yang tidak mampu dan layak untuk menerima bantuan sosial. Data kemiskinan itu bersifat fluktuatif, bergerak dan berubah setiap waktu, jadi kalau sewaktu-waktu ditemukan di lapangan penerima bantuan sosial yang sudah mampu, maka akan kita ajukan untuk garduasi dari penerima bantuan sosial.”⁸³

berdasarkan hasil wawancara bersama pendamping BPNT Bapak

Fandi bahwa disanggah masyarakat bantuan tersebut belum tepat sasaran, adapun hasil wawancaranya:

“Menurut saya program tersebut belum tepat sasaran, untuk KPM penerima bantuan program BPNT perdesa berkisar 400 KPM, masih banyak keluarga miskin yang belum merasakan manfaat program BPNT ini, seperti masyarakat pendatan yang keadaan ekonominya dikatakan tidak mampu namun belum terdata oleh pihak desa ada juga keluarga yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan ini karena belum adanya pembaruan data mengenai KPM sehingga keluarga yang awalnya tidak mampu sekarang sudah mampu masih mendapatkan bantuan tersebut dan masih banyak juga keluarga yang sudah mampu tapi mereka enggan untuk melepaskannya karna tidak ada orang yang tidak ada orang yang tidak ingin mendapatkan sesuatu yang gratis sekalipun keluarganya sudah mampu. Saya selaku pendamping, hanya bertugas mendampingi saja tidak berhak menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut.”⁸⁴

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan ibu juwariah selaku

penerima KPM, yang menyatakan bahwa:

“Kalo mengenai tepat sasaran atau tidaknya, menurut saya belum tepat sasaran, dilihat dari perekonomiannya mereka banyak yang sudah mampu, tetapi masih menerima bantuan ada yang memang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut tetapi tidak mendapatkannya. Saya selaku pnrma bantuan dari program ini sangat terbantu selalin mengurangi pengeluaran juga memenuhi gizi yang seimbang”.⁸⁵

Ibu partin juga mengatakan sama dengan ibu Juwariah bahwa

Program BPNT ini belum tepat sasaran, ia mengatakan: “Penyaluran

⁸³ Eko, Wawancara 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 14 W-24-III/23

⁸⁴ Fandi, Wawancara, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara kode 11 W-24-III/23

⁸⁵ Juwariah, Wawancara, 24 Februari Lihat Transkrip Wawancara Kode 03 W-24-III/23

Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Ponorogo menurut saya masih belum tepat sasaran sehingga masih adanya kecemburuan sosial. Terdapat keluarga yang seharusnya dapat merasakan manfaat dari adanya program tersebut tetapi tidak mendapatkannya”.⁸⁶

Ibu Nur mengatakan bahwa program BPNT juga belum tepat sasaran ia mengatakan: “Belum mbak, masih banyak yang belum mendapatkan bantuan BPNT, ada yang rumahnya bagus tapi di beri bantuan, ada tetangga saya yang kurang mampu pendapatan sangat minim atau tidak menentu, tapi dari pihak desa tidak di daftarkan.”⁸⁷

2. Sosialisasi program

Sosialisasi program pada BPNT memberikan pemahaman terhadap para pemangku kepentingan mengenai kebijakan dan aspek pelaksanaan program, memberikan pemahaman terhadap KPM tentang tujuan dan mekanisme program tersebut, selain itu juga memberikan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang.

Dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Kabupaten Ponorogo telah diadakan sosialisasi per Kecamatannya, tidak hanya KPM yang menjadi sasaran dalam program ini tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan program, seperti pihak desa, pendamping desa, serta kepada penanggung jawab agen desa. Hal ini dibuktikannya dengan hasil wawancaranya dari bapak Ukib

⁸⁶ Partin, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 01 W-24-III/23

⁸⁷Nur, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 09 W-24-III/23

selaku pendamping desa sebagai berikut:

“Untuk sosialisasi mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini sudah dilakukan sosialisasi, sosialisasi program tersebut bertujuan memberikan pemahaman terutama terhadap KPM penerima bantuan yaitu tentang mekanisme pelaksanaan program, tata cara penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta diberikannya edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang, untuk sosialisasi yang mengadakan dari pihak desa”.⁸⁸

Selain pernyataan dari bapak ukib, terdapat Bapak Fandi selaku pendamping mengatakan:

“Saya sebagai pendamping mengarahkan agen *warung* untuk memberikan informasi terkait bagaimana alur dari bantuan bisa di salurkan dengan tepat dan sesuai tujuan awal dari BPNT kepada KPM. Pendamping mengedukasi bahwa BPNT ini dapat di cairkan hanya melalui *e-warung* yang bekerja sama dengan bank, pendamping menjelaskan bahwa pihak *e-warung* harus memberikan terbaik untuk KPM, baik dalam segi pelayanan maupun kualitas bahan makanan”.⁸⁹

Dari pernyataan pendamping BPNT tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan ibu Parti selaku KPM Bantuan Pangan Non Tunai Di Kabupaten Ponorogo, menyatakan:

“Selama saya mendapatkan bantuan BPNT, tiap pertemuan rutin bulanan saya selalu hadir, kalau saya tidak hadir nanti dana BPNT saya tidak keluar di bulan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan pada saat pertemuan rutin bulanan itu selain daftar hadir/absen ya mbak, karena dari pendamping diberi buku modul tentang pendidikan, kesehatan, tentang keuangan keluarga begitu mbak, terkadang dari pendamping BPNT diisi dengan sosialisasi tentang cara mengasuh anak yang benar dan baik, cara mengelola keuangan dalam keluarga. Namun kalau pelatihan keterampilan dari pendamping belum pernah menyampaikan mbak, jadi pertemuan bulanan itu kita selalu mendapat masukan hanya sosialisasi dari pendamping gitu aja mbak.”⁹⁰

Pernyataan ini sama halnya dengan pernyataan yang telah diungkapkan oleh ibu Sumiyem tentang sosialisasi program,

⁸⁸Ukib, Wawancara, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 12 W-24-III/23

⁸⁹Fandi, Wawancara, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 11 W-24-III/23

⁹⁰ Parti, Wawancara, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 01 W-24-III/23

mengatakan:

“Pertemuan rutin antara KPM dan pendamping selalu dilakukan setiap bulan, adapun kegiatan awal yang dilakukan itu biasanya mengisi absen/daftar hadir terlebih dahulu, setelah itu baru pendamping PKH menyampaikan sosialisasi tentang materi PKH dan Sembako sesuai dengan modul p2k2, akan tetapi dalam hal penyampaian mengenai pengembangan keterampilan atau kerajinan tangan gitu dari pandang belum pernah disampaikan, jadi hanya ada sosialisasi saja mba”.⁹¹

Berdasarkan data hasil wawancara di atas diketahui dari proses sosialisasi yang merupakan tujuan dari proses sosialisasi yang merupakan tujuan dari pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, dimana dalam setiap bulannya selalu diadakan pertemuan rutin dan peserta penerima manfaat berkewajiban untuk mengikuti pertemuan rutin bulanan tersebut.

3. Tujuan program

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan upaya pihak pemerintah dapat menggantikan bentuk bantuan menjadi non tunai melalui penggunaan kartu elektronik. Bantuan sosial tersebut disalurkan menggunakan sistem perbankan. Tujuan ini mengurangi pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan gizi yang seimbang, meningkatkan ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penerima, memberikan kendali kepada KPM pada mencukupi kebutuhan pangan tersebut.

Dengan dibuktikannya dari berbagai sumber dalam paparan data

⁹¹ Sumiyem, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 02 W-24-III/23

di bawah ini, dalam tujuan utama program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dapat mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan gizi yang seimbang terhadap KPM penerima bantuan. hal ini diperkuat dari hasil wawancara yang dilakukannya oleh bapak Fandi selaku sebagai pendamping BPNT kecamatan, ia mengatakan:

“Iya benar, penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai dalam rangka memberikan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan, intinya program ini dapat diberikan untuk mngurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan gizi yang seimbang terhadap KPM penerima bantuan. Untuk program sudah berjalan sesuai dengan tujuannya”.⁹²

Selain pernyataan diatas, Bapak Eko sebagai pendamping desa juga menyatakan bahwa tujuan utama dari program BPNT itu mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan gizi yang seimbang terhadap KPM, adapun hasil wawancaranya:

“Pemberian program BPNT kepada masyarakat yang membutuhkan dalam arti untuk mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan gizi yang seimbang terhadap KPM sehingga terpenuhi dari nilai gizi yang seimbang. Saya selaku pendamping desa, sejauh ini program tersebut sudah sesuai dengan prosedurnya dan telah berjalan dengan tujuan. Tetapi untuk ketepatan sasaran dan ketepatan waktu perlu ditingkatkan lagi karena masih banyak ditemukan bahwa program tersebut belum tepat sasaran dan untuk ketepatan waktu masih ditemukannya data yang tidak keluar pada saat penerima”.⁹³

Kemudian pernyataan dari ibu Erna sebagai penerima BPNT:

“Perekonomian saya sebelumnya bisa dikatakan kurang baik mbak, dengan adanya program tersebut saya sangat terbantu untuk memenuhi gizi yang seimbang bagi keluarga selain itu menghemat biaya pengeluaran walaupun tidak seberapa”.⁹⁴ Diperkuat dari jawaban dari

⁹² Fandi, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 11 W-24-III/23

⁹³ Eko, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 14 W-24-III/23

⁹⁴ Erna, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 06 W-24-III/23

ibu Nur sebagai penerima program BPNT ia mengatakan bahwa:

“Iya benar, dengan adanya bantuan yang diberikan sangat membantu pengeluaran kami lalu pemenuhan gizi yang seimbang. Menurut saya untuk tujuan dari program BPNT tersebut sudah terlaksana sebagaimana dengan tujuannya, karna dengan adanya program bantuan tersebut para KPM yang memang benar-benar membutuhkan sangat terbantu”.⁹⁵

Pernyataan hasil wawancara dengan Ibu Toimah selaku penerima manfaat beliau menyatakan bahwa:

“Saya sebagai seorang ibu rumah tangga, suami saya bekerja sebagai buruh tani dan serabutan, untuk penghasilan suami saya dalam sebulan tidak menentu karena menjadi buruh tani tidak setiap hari bisa bekerja, keluarga saya mendapat bantuan PKH dan Sembako ini sejak tahun 2018, kemarin saya mendapat bantuan PKH berupa uang Rp.500.000 tiap 3 bulan sekali dan bantuan sembako berupa beras 10kg, telur, dan kacang. Bantuan PKH berupa uang tersebut biasanya saya gunakan untuk keperluan sekolah anak saya mbak dan beli kebutuhan rumah tangga, saya merasa pantas mbak dalam menerima bantuan PKH ini karena merasa kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari jika hanya mengandalkan penghasilan suami saja masih belum cukup mbak, dan menurut saya bantuan ini sudah sesuai tujuan karena yang menjadi anggota PKH dikelompok saya ini termasuk dalam kategori keluarga yang kurang mampu”.⁹⁶

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan gizi yang seimbang, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penyaluran, serta memberikan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dari semua tujuan tersebut untuk ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran belum begitu efektif, belum sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu telah dijelaskan oleh beberapa

⁹⁵ Nur, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 08 W-24-III/23

⁹⁶ Toimah, *Wawancara* 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara Kode 05 W-24-III/23

pihak terkait program tersebut bahwasanya dengan adanya program tersebut membantu perekonomian khususnya KPM penerima bantuan ini, walaupun tidak seberapa namun sudah dapat memenuhi kebutuhan pangannya.

4. Pemantauan program

Pemantaun Program Bantuan Pangan Non Tunai yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo, meliputi dari: Proses Pembukuan Rekening, Proses Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Proses penggantian KPM, Realisasi penyaluran dana, Ketersediaan bahan pangan di *E-Warong*, dan proses penggantian KKS jika terjadi rusak/hilang. Pemantauan pelaksanaan program tersebut dapat menggunakan formulir pemantauan. Untuk pemantauan dalam program yang berada di Kabupaten Ponorogo dibuktikan dengan hasil wawancara dari bapak Eko selaku pendamping desa, adapun hasil wawancara sebagai berikut: “Dari awal Pelaksanaan pemantauan Program Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan pada saat penyaluran program BPNT kepada KPM. Pelaksanaan penyaluran dilakukan selama satu hari”.⁹⁷

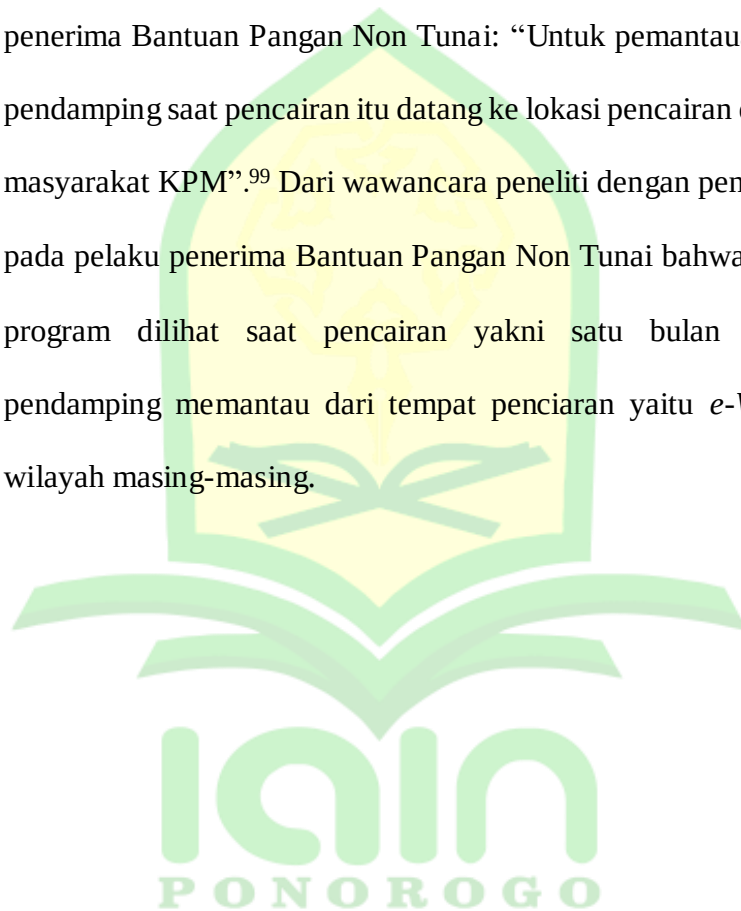
Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Ukib yakni mengenai dilakukannya pemantauan yang dilakukan selama berlangsung sebelum dan setelah mendapatkan bantuan, menyatakan:

“Dari awal pendamping PKH selalu mengadakan pertemuan rutin tiap bulan sekali mbak, jadi dalam pertemuan itu, saya memberikan

⁹⁷Eko, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara 14 W-24-III/23

pengarahan, pendampingan, pemantauan sekaligus sosialisasi tentang pentingnya kesehatan dan pendidikan mbak, karena sesuai dengan tujuan pemberian bantuan ini yakni untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ya mbak, dengan terjaminnya pendidikan dan kesehatan bagi KPM maka kesejahteraan akan mudah dicapai, bukankah seperti itu mbak, selain itu saya juga adakan evaluasi program juga mbak, jadi jika terdapat masalah maupun hambatan untuk kedepannya sudah memiliki bekal mbak”.⁹⁸

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Toimah selaku penerima Bantuan Pangan Non Tunai: “Untuk pemantauan dari pihak pendamping saat pencairan itu datang ke lokasi pencairan dan melayani masyarakat KPM”.⁹⁹ Dari wawancara peneliti dengan pendamping dan pada pelaku penerima Bantuan Pangan Non Tunai bahwa pemantauan program dilihat saat pencairan yakni satu bulan sekali, para pendamping memantau dari tempat pencairan yaitu *e-Warong* pada wilayah masing-masing.



⁹⁸ Ukib, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara 12 W-24-III/23

⁹⁹ Toimah, *Wawancara*, 24 Februari 2023, Lihat Transkrip Wawancara 05 W-24-III/23

BAB IV

ANALISIS

A. Realisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah upaya pemerintah mentransformasi bentuk bantuan menjadi non tunai melalui penggunaan kartu elektronik yang selanjutnya disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga miskin, tidak mampu atau rentan terhadap resiko. Program Bantuan Pangan Non Tunai membantu dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan tujuan jangka Panjang di harapkan dengan adanya bansos ini akan memutuskan rantai kemiskinan. Program ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam percepatan penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia.¹⁰⁰

Program BPNT merupakan hasil tranformasi dari Program pemerintah sebelumnya yaitu Program Beras Sejahtera (Rastra) kemudian pada tahun 2018 program BPNT hadir sebagai memperbaiki program sebelumnya. Berbagai perubahan yang terjadi mulai masuk awal saldo sebesar Rp.110.000. Masyarakat Kabupaten Ponorogo dengan pencaharian yang mayoritas sebagai petani, buruh tani, kuli bangunan, tukang bengkel, dan lain sebagainya. Warga

¹⁰⁰ Pedoman Umum Program Sembako, *Pedoman Umum Program Sembako 2020*, Jakarta (Kementerian Sosial, 2020), 217.

Dengan kondisi ekonomi prasejahtera yang pendapatannya di bawah rata-rata masih cukup.

Berdasarkan teori dadang solihin mengatakan upaya dalam pengentasan kemiskinan harus terus menerus dilakukan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Dengan melakukan strategi pengentasan kemiskinan diantaranya yaitu:

1. Kebijakan Program

Kebijakan program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan merupakan yang mendasar dan strategi sebagai daerah. Untuk mewujudkan program pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan asal-asalan dalam bentuk instan karena terkait bahwa jenis, tingkat dan kualitas kemiskinan yang bervariasi.¹⁰¹

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di kabupaten Ponorogo dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program BPNT disalurkan melalui pendamping yang ditunjuk setiap kecamatan untuk bertanggung jawab. Penyaluran BPNT melibatkan Agen Warung. Adapun bahan pangan untuk program BPNT adalah sumber karbohidrat (beras, atau bahan pangan lokal), sumber protein hewani (telur, daging, ayam, ikan) dan lain sebagai yang bermanfaat untuk tubuh. Dalam kualitas pihak yang terlibat benar-benar mengecek sesuai takaran dan aturan dari pemerintah. Selama proses penyaluran program BPNT disalurkan kepada masyarakat yang sesuai

¹⁰¹ Solihin, *Administrasi Pembangunan*, 54.

dengan kriteria atau yang paling membutuhkan. Peserta anggota BPNT di persyaratkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercantum sebagai data PPKS atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan teori Dadang Solihin mengatakan sumber daya manusia dalam pengentasan kemiskinan menjadi bagian penting dan sangat menentukan. Karena banyak kejadian pelaksanaan program bukan seseorang paham benar dengan persoalan kemiskinan. Maka dari itu dimulai dari rekrutmen sampai dengan pelatihan atau pendidikannya sebagai perlu dilakukan untuk seleksi.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan bahwa pendamping dari program Bantuan Pangan Non Tunai dari kecamatan dan desa. Untuk menentukan masyarakat miskin pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari pihak desa. Di kabupaten Ponorogo dilaksanakan dengan monitoring, evaluasi, sosialisasi dan edukasi. Ketika KPM datang ke kantor desa masing-masing lalu menanyakan permasalahannya lalu langsung evaluasi kemudian sosialisasi yang dijelaskan kembali bagaimana menangani masalahnya dan kemudian di edukasi di berikan arahan apa yang harus dilakukan. Adanya monitoring pada program BPNT di kabupaten Ponorogo untuk mempersiapkan sasaran mana yang harus di datangi, siapa saja yang akan terlibat, kemudian mengumpulkan data yang nanti untuk di analisis yang nantinya di laporkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

3. Pendataan

Dalam teori Dadang Solihin mengatakan tentang akurasi data tentang kemiskinan menjadi bagian yang sangat penting terkait dengan pilihan program yang harus diputuskan untuk di implementasikan yang tentunya disesuaikan dengan kondisi situasi yang ada.¹⁰²

Berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai pendataan penerima KPM di wilayah Kabupaten Ponorogo masih didasarkan pada data lama yang tidak sering diperbarui sehingga seringkali ditemukan laporan dari masyarakat mengenai mengapa dirinya tidak terdata sebagai penerima program BPNT sedangkan terdapat masyarakat yang di golongan tidak layak mendapatkan program BPNT justru mendapatkannya. Sehingga dengan tidak tercatatnya pendataan yang akurat dapat menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan wilayah kabupaten Ponorogo.

B. Kendala Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam bukunya kamus lengkap bahasa Indonesia, kendala adalah, menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran, rintangan, halangan.¹⁰³ Kendala adalah keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran.

¹⁰² *Ibid*,

¹⁰³ Abdillah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 329.

Setiap pendamping per kecamatan di kabupaten Ponorogo membahas kendala yang terjadi seperti kesulitan pendamping untuk kelapangan, kendala KPM yang sudah tidak layak dapat mendapatkan bantuan dan juga mengenai kerjasama komunikasi antara pendamping dengan *e-warong*. Dalam hal ini pendamping kurang komunikasi dalam menangani dalam permasalahan yang dihadapi.

Rapat yang selalu diadakan setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, bertempat di kantor kecamatan masing-masing, rapatnya ini para pemilik *E-warong* dan pendamping sebagai koordinator rapat, pembahasannya itu seperti kendala dan juga solusi tepat dalam menanganinya serta penilaian terhadap *e-warong*, kendala yang dibahas yaitu saat pencairan bantuan, KPM yang bantuannya di hentikan, dan bahan makanan yang mencakup kualitas dan harga yang dijual ke KPM, dan kendala jika ada oknum yang mencurigakan

Berdasarkan hasil temuan peneliti mengenai ketepatan sasaran adanya kendala yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Ponorogo belum tepat sasaran, karena berdasarkan hasil wawancara KPM disana hampir keseluruhan KPM digolongkan keluarga mampu, sehingga sudah tidak berhak lagi menerima bantuan BPNT. Dan memang pada saat turun riset, penerima program BPNT ini tidak diperbarui kembali penerimanya masih memakai data yang lama.

Kemudian kendala mengenai pemantau program yaitu dana pada Kartu Keluarga (KKS) kosong, ternyata setelah dilakukan pengecekan data diri tidak sesuai selain itu KPM yang sulit untuk dihubungi pada saat penyaluran

program sehingga menghambat proses penyaluran.

C. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

Terdapat sejumlah permasalahan utama yang dihadapi di Indonesia pada saat ini, salah satunya permasalahan tentang kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut, melainkan hanya dikurangi jumlah dan di minimalkan derita masyarakat miskin. Peran pemerintah dalam mengurangi jumlah dan meminimalisir kemiskinan salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjadi kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos. Program yang direncanakan oleh pemerintah bertujuan untuk memperoleh pencapaian tujuan, termasuk juga tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Berdasarkan teori menurut H. Emerson yang diungkapkan oleh Soewarno Handyaningrat S. Yakni efektivitas merupakan pelaksanaan ukuran pencapaian tujuan tertentu. Indikator yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengukur efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo berdasarkan Richard M. Steers, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Ketetapan sasaran program

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan upaya

¹⁰⁴ Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*.

pemerintah mentranformasikan bentuk bantuan menjadi non tunai melalui penggunaan kartu elektronik yang selanjutnya disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga miskin

Program Bantuan Pangan Non Tunai yang diterima oleh setiap KPM besarnya sama dengan nilai Rp.110.000. persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut yaitu verifikasi dan validasi data dari pihak desa hingga ditetapkan menjadi DTKS oleh kementerian sosial. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Sasaran dari program ini adalah masyarakat yang termasuk dalam kriteria program tersebut, di antaranya keluarga berpendapatan rendah yang tidak berpenghasilan tetap, tetapi memiliki pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhannya. Dan rumah dengan kondisi yang tidak layak huni.

Berdasarkan hasil data dan sumber data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan adanya tidak ketidaktepatan sasaran dalam program ini. Di mana ketidaktepatan sasaran tersebut terdapat keluarga yang kurang mampu tetapi tidak mendapatkan bantuan, dan ada keluarga yang dikatakan sudah mampu masih mendapatkan program bantuan tersebut. Di wilayah kabupaten Ponorogo penerima bantuan BPNT kebanyakan keadaan perekonomian baik di mana mereka sebagian besar mempunyai lahan

pertanian. Meskipun mereka tidak menikmati setiap hari tetapi masih bisa memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan hasil panen raya untuk beberapa bulan kedepan. Masih banyak ditemukannya masyarakat miskin yang belum merasakan manfaat dari program yang disalurkan, mereka adalah pendatang yang perekonomiannya rendah tetapi tidak terdata dalam program tersebut, terdapat keluarga yang memang benar-benar sudah dikatakan mampu tetapi mereka masih tetap mendapatkan bantuan ini dikarenakan data yang digunakan masih mengacu pada data penerima bantuan yang lama, belum ada pendataan lagi.

Dengan demikian ketepatan sasaran pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah kabupaten Ponorogo masih belum efektif, belum ada pembaharuan data. Dalam menetapkan sasaran dari program sebaiknya benar-benar dilakukan secara tepat, padahal masih banyak keluarga yang belum merasakan manfaat dari program tersebut. Pada penerima BPNT di Kabupaten Ponorogo kebanyakan tidak termasuk kriteria program.

2. Sosialisasi program

Sosialisasi merupakan sarana ukuran pada sebuah perkumpulan untuk memahami sejauh mana pemahaman yang diberikan terhadap program yang berjalan. Berdasarkan teori Richard M. Steers mengatakan efektivitas sosialisasi program kesanggupan penyelenggaraan program pada pelaksanaan sosialisasi program mengenai program bisa tersampaikan ke masyarakat pada umumnya serta sasaran peserta program pada

khususnya.¹⁰⁵

Dalam mekanisme sosialisasi dari faktanya di lapangan, Dinas Sosial membagikan sosialisasi pada penerima bantuan ketika mendapatkan Kartu Penerima Manfaat dan menyampaikan kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bantuan ini. Di mana ada beberapa dari mereka yang tidak bisa mengikuti sosialisasi program dikarenakan hal mendesak yang tidak bisa ditinggalkan pada waktu dilakukannya sosialisasi. Dari data yang ditemukan terkait sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai di wilayah Kabupaten Ponorogo menunjukkan sosialisasi sudah dilaksanakan dengan memberikan pemahaman terutama kepada KPM tentang program, sehingga KPM tidak salah paham mengenai pemberian bantuan dan tidak salah dalam menggunakannya.

Dengan demikian sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai kepada wilayah Kabupaten Ponorogo sudah dilaksanakan namun, belum efektif pada seluruh masyarakat penerima KPM BPNT, seperti dengan persyaratan salah satu tidak teridentifikasi, aturan dan nominal yang berhak beliau dapatkan. Masyarakat penerima BPNT masih belum paham akan manfaat bantuan tersebut, maka dari itu kurangnya edukasi tentang sosialisasi.

3. Tujuan Program

Tujuan program merupakan keberhasilan suatu program dalam

mencapai hasil akhir yang telah ditentukannya sebelumnya. Tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diantaranya mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan gizi yang seimbang terhadap KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan ketepatan waktu serta memberikan kendali kepada KPM untuk memnuhi kebutuhan pangan.

Berdasarkan teori Richard M. Steers tujuan program dikatakan efektif maka dibutuhkan tahapan-tahapan, baik tahapan pencapaian maupun tahapan prioritasnya.¹⁰⁶ Dengan begitu tujuan suatu program tersebut akan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan.

Fakta dilapangan yang diperoleh sebelumnya bahwa tujuan program BPNT telah berjalan sebagaimana mestinya, di mana dari data yang diperoleh masyarakat penerima bantuan merasa terbantu dengan adanya program tersebut walaupun masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran penerima program ini. Selain itu masyarakat penerima BPNT dapat mengurangi beban pengeluaran dalam pemenuhan. Tetapi ketidak tepatan waktu masih sering terjadi keterlambatan. Dengan demikian tujuan program di Kabupaten Ponorogo telah efektif dan di manfaatkan untuk kebutuhan gizi pada tubuh, hal ini dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui program bantuan tersebut.

4. Pemantau program

Pemantauan program ialah mengenai pengetahuan yang dibutuhkan.

Pemantauan melalui tahap yang optimal dapat dimanfaatkan dalam

melaksanakan perhitungan dengan periode yang memperlihatkan untuk mencapai tujuan. Bentuk pemantauan datanya: proses pembukuan rekening, proses distribusi KKS, proses penggantian KPM, realisasi penyaluran dana, ketersediaan bahan pangan di *e-warong*, dan proses penggantian KKS jika terjadi rusak/hilang. Pemantauan pelaksanaan program tersebut dapat menggunakan formulir pemantauan. Kemudian hasil pemantauan tersebut dianalisis dan dilaporkan kepada tim pengendalian.

Berdasarkan teori dari teori Richard M. Steers mengatakan pemantauan program dikatakan efektif jika kegiatan mengamati pelaksanaan program dan proyek, dalam waktu yang sedang berjalan, serta mencoba memperbaiki kesalahan agar pada akhir penyelesaian.¹⁰⁷ Maka program diharapkan dapat dilaksanakan dengan benar.

Berdasarkan hasil temuan penulis mengenai pemantauan program bahwasannya pemantauan dilaksanakan di wilayah kabupaten Ponorogo pada saat proses penyaluran bantuan kepada KPM. Penyaluran bantuan dilaksanakan 2 kali ada yang 1 kali saja, tergantung banyaknya KPM di daerah masing-masing. Saat pencairan masih ada yang belum cair di hari itu maka masyarakat mengeluhkan kepada pihak pencairan di *e-warong* saja.. Pendamping melayani masyarakat miskin saat pencairan di *e-warong*. Tetapi tidak semua pendamping memantau dari proses awal sampai pencairan.

Dengan demikian pemantauan program bantuan di wilayah

Kabupaten Ponorogo belum efektif, sebab dalam pemantauan program BPNT masih kurang efektif. Para pendamping tidak selalu hadir dalam pencairan, pemantau tidak hanya dilihat dalam pencairan tetapi dari realisasi dana, ketersediaan pangan di *e-warong*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan upaya pemerintah mentransformasi bentuk bantuan menjadi non tunai melalui penggunaan kartu elektronik yang selanjutnya disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga miskin, tidak mampu atau rentan terhadap resiko. Program Bantuan Pangan Non Tunai membantu dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan tujuan jangka Panjang di harapkan dengan adanya bansos ini akan memutuskan rantai kemiskinan. Program ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam percepatan penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia. Program BPNT merupakan hasil tranformasi dari Program pmerintah sebelumnya yaitu Program Beras Sejahtera (Rastra) kemudian pada tahun 2018 program BPNT hadir sebagai memperbaiki program sebelumnya. Berbagai perubahan yang terjadi mulai masuk awal saldo sebesar Rp.110.000.
2. Kendala yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pengentasan kemiskinan di wilayah Ponorogo belum tepat sasaran, karena berdasarkan hasil wawancara KPM disana hampir keseluruhan KPM

digolongkan keluarga mampu, sehingga sudah tidak berhak lagi menerima bantuan BPNT. Dan memang pada saat turun riset, penerima program BPNT ini tidak diperbarui kembali penerimanya masih memakai data yang lama.

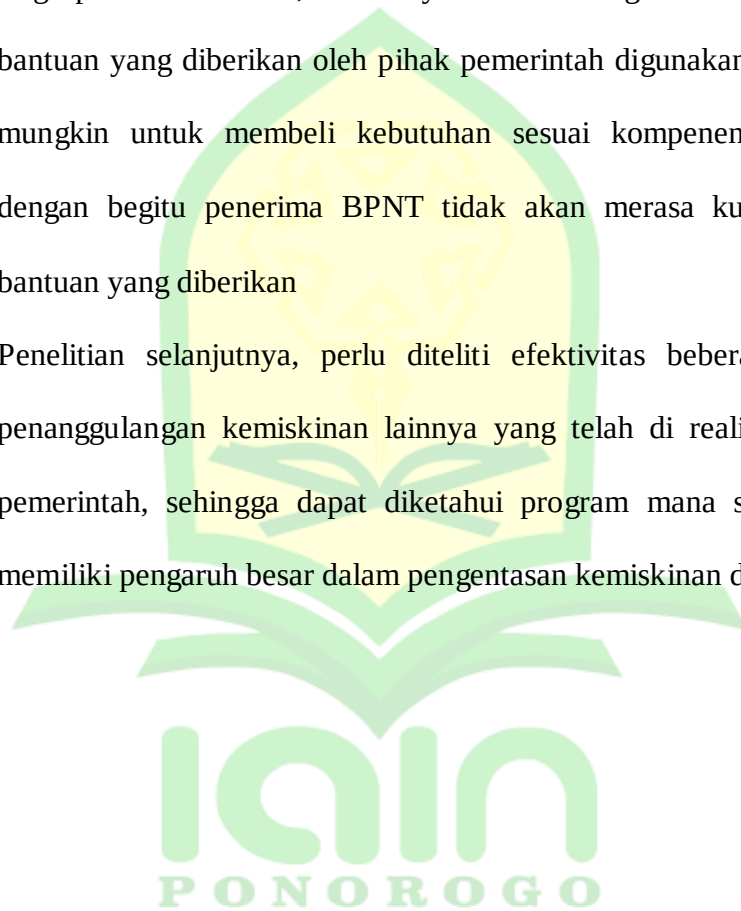
3. Efektivitas dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Ponorogo dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur keefektifan program tersebut dengan ketepatan sasaran. Program BPNT di Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan belum efektif, hal tersebut belum maksimal pelaksanaannya. Indikator kedua efektivitas sosialisasi program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan belum efektif. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan, kepada KPM penerima bantuan tersebut salah menggunakannya dan boros. Indikator kedua tujuan program cukup efektif, dikarenakan masih ditemukan ketidaktepatan sasaran, sehingga masih banyak keluarga belum merasakan manfaat. Indikator terakhir efektivitas pemantauan program penyaluran BPNT dapat dikatakan belum efektif karena masih ditemukan kendala.

B. Saran

1. Bagi pihak Dinas Sosial, atau pendamping BPNT, sebaiknya dalam mengambil atau mengelola data perihal masyarakat miskin atau keluarga tidak mampu diharapkan lebih tepat sasaran lagi dengan

adanya pendataan kembali warga yang berhak mendapatkan program Bantuan Pangan Non Tunai, karena belum meratanya BPNT untuk warga miskin yang ada di Kabupaten Ponorogo.

2. Bagi Pendamping BPNT, diharapkan agar lebih berperan aktif lagi dalam menyampaikan sosialisasi kepada penerima bantuan.
3. Bagi penerima BPNT, sebaiknya dalam mengelola bahan pangan bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah digunakan semaksimal mungkin untuk membeli kebutuhan sesuai kompenennya. Karena dengan begitu penerima BPNT tidak akan merasa kurang dengan bantuan yang diberikan
4. Penelitian selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah di realisasikan oleh pemerintah, sehingga dapat diketahui program mana sajakah yang memiliki pengaruh besar dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Pius dan Danu Prasetya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arloka, 2016.
- Afif Izam Taufik, Ajeng Wahyuni. “Efektivitas Pemberdayaan Zakat Produktif Di Laboratorium Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf IAIN Ponorogo.” *Nidhomiya : Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 1, no. 1 (2022): 5.
- Anggraini, Puput. “Tinajuan Ekonomi Syariah Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Ngatabaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi.” Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019.
- Aprilia, Sri Dewi. “Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Indeks Keparahatan Dan Kedalaman Kemiskinan.” Universitas Medan Area, 2022.
- Asrayanti. “Efektivitas Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Baihaqi. “Analisis Efektivitas Peran Pemerintah Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan (Kajian Di Kabupaten Pidie Jaya).” *Journal of Islamic Law* 04, no. 01 (2022): 2.
- Budiani, Ni Wayan. “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna ‘Eka Bhakti’ Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.” *Ekonomi Dan Sosial INPUT* 2, no. 1 (2017): 34.
- Cica Sartika, M. Yani Balaka dan Wali Aya Rumbia. “Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabuapten Muna.” *Jurnal Ekonomi* 1, no. 1 (2016): 108.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2010.
- Effendi, Tadjuddin Noer Effendi. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1993.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hadiguna, Indrawardy. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan

- Di Kota Medan.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.
- Halimah, Nur. “Pendistribusian Bntuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Prsektif Positif Dan Hukum Islam.” Jurusan HukumEkonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019.
- Hanadayaningrat, Suwarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung, 1994.
- Hapsoyo, Sulkan Yasin, Sunarto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer Dan Kosa Kata Baru*. Surabaya: Mekar, 2008.
- Imron, Masyuri. “Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan.” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 5, no. 1 (2003): 70.
- Irwan Noor, Isnaini Kholif, Khodizah. “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.” *JAP*. Vol. 2, n.d.
- Ishak, Fadlurrohman, Soni Akhmad Nulhaqim, Sri Sulastris. “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi).” *Social Work Journal* 9, no. 2 (2019): 124.
- Kartiawati. “Analisis Efektivitas Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan).” UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Khali, Dhiaul. “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampong Dalam Mngentaskan Kmiskinan Di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Khomsan, Ali. *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Kominfo. “52 Keluarga Miskin Lulus Dari Status KPM PKH.” Kominfo Ponorogo, 2020. <https://ponorogo.go.id/2019/05/16/52-keluarga-miskin-lulus-dari-status-kpm-pkh/>.
- Lincoln, Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*. Unit Pener. Yogyakarta, 2020.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Mujahiddin, Ananda Mahardika. *Perempuan Dan Kemiskinan*. Medan: UMSU-PRESS, 2017.

- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mutiarin, Rizal Khadafi. "Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten GunungKidul." *Of Governance And Public Policy* 4, no. 2 (2017): 334.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Ni Wayan, Budiani. "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Bhakti' Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar." *Jurnal Ekonomi Dan Sosial* 2, no. 1 (2017): 34.
- Nuryana, Wiwin. "Efektivitas Pemberian Bantuan Program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Perempuan) Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Sawoo Kabuapten Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- "Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Pasal (3), Pasal (4), Dan Pasal (5)," n.d.
- Ponorogo, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2019*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2018.
- Prijambodo. *Monitoring Dan Evaluasi*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014.
- Pulungan, Khoirunnisa. "Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Tapanuli Selatan." Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuh, 2022.
- Putra, Agung Aldino. "Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama)." *Jurnal Katalogis* 6, no. 8 (2018): 3.
- Rachman Benny, Adang Agustina, Wahyudi. "Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)." *Analisis Kebijakan Pertanian* 16, no. 1 (2018): 2.
- Retnoningsih, Suharno dan Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Rizki Rigeras Aldzuhri D. "Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2019." Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal, 2021.

- Sabda, Ariyan. “Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Asahan).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
- Said Abadi, Muzakir. “Efektivitas Publisitas Produk Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Caban Ponorogo).” *Of Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2022): 47.
- Sembako, Pedoman Umum Program. *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Jakarta. Kementerian Sosial, 2020.
- Septian, Muhammad Eko Permana. “Peran Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Silalahi, Ulber. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2000.
- Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung, 2016.
- Solihin, Dadang. *Administrasi Pembangunan*. Surabaya: Jakad Media, 2021.
- Sopha, Julia. *Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Sri Budi, Cantika. “Strategi Pengntasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam.” *Ekonomika-Bisnis* 4, no. 2 (2013): 108.
- Statistik, Badan Pusat Kabupaten Ponorogo. “Garis Kemiskinan, Jumlah, Dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Ponorogo 2019-2021.” BPS PONOROGO, 2021. <https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/23/61/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-ponorogo.html>.
- . *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2019*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2004.
- Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Makassar: Kencana, 2007.
- TNP2K. “Program Penanggulangan Kemiskinan,” n.d.
- Triana, Amin Nur. “Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pada Peserta BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Tunai, Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non. *Pedoman Umum*, n.d.
- Yuliana, Monika. “Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di Ponorogo.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Yunita, Nida Faizatul, Ratna Yunita. “Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Ponorogo.” *Journal Of Economics and Business Research* 1, no. 2 (2021).

